

DEPARTEMEN PERTAHANAN KEAMANAN RI
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL



**PEMBANGUNAN NASIONAL
DENGAN PENDEKATAN
KETAHANAN NASIONAL**

Oleh :

PROF. DR. WAN USMAN, MA
PEMBINA UTAMA (IV/e)

**KERTAS KARYA PERORANGAN (TASKAP)
KURSUS SINGKAT ANGKATAN (KSA) - IV
TAHUN 1994**

KATA PENGANTAR

Kertas karya ini mengambil judul: Pembangunan Nasional Dengan Pendekatan Ketahanan Nasional. Melalui kertas karya ini penulis akan membawa pembaca untuk mengetahui usaha untuk melaksanakan dan mencapai tujuan pembangunan dengan pendekatan ketahanan nasional. Penyelesaian-penyelesaian problema pembangunan merupakan tugas yang lebih sulit dari pada apa yang orang ketahui tentang pembangunan itu sendiri. Meningkatkan produksi nasional, mengangkat harkat kehidupan masyarakat, menciptakan kesempatan kerja ternyata tidak cukup didekati dari ilmu ekonomi semata-mata. Semua aspek tersebut banyak menyangkut masalah nilai, insentif, pandangan hidup, kelembagaan serta kekuatan pengaturan masyarakat.

Ahli ekonomi memandang hal ini sebagai faktor non ekonomik. Ahli ekonomi biasanya tertarik pada masalah kesejahteraan, sedangkan faktor di luar itu dianggap sebagai faktor non ekonomik. Tulisan ini akan ikut mempertimbangkan faktor non ekonomik itu dalam membahas masalah pembangunan. Bahkan lebih tegas lagi, ingin melihat masalah pembangunan nasional dengan mempertimbangkan semua aspek kehidupan bangsa. Pendekatan dengan mempertimbangkan

semua aspek kehidupan ini dikenal dengan nama pendekatan ketahanan nasional.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Lemhannas serta Direktur Pendidikan Lemhannas yang telah memungkinkan terlaksananya tulisan ini. Demikian juga halnya dengan Bapak Mayjen (Purn) Sri Hardiman, S.H. yang telah bersedia menjadi tutor Taskap ini.

Akhirnya segenap kritik yang konstruktif terhadap tulisan ini akan diterima dengan segala kerendahan hati.

Jakarta, Mei 1994

Penulis,

WAN USMAN

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Permasalahan dan Perumusan Masalah	1
2. Maksud dan Tujuan	7
3. Pendekatan	8
4. Sistematika	8
5. Pengertian	10
6. Lampiran	11
BAB II PEMBANGUNAN DAN KETAHANAN NASIONAL DENGAN KORIDOR WAWASAN NUSANTARA	
1. Pandangan Umum	12
2. Fungsi Ketahanan Nasional	13
3. Pembangunan Nasional dan Ketahanan Nasional	29
4. Wawasan Nusantara	35
5. Hasil PJPT 1 Indonesia Serta Permasalah- an Pembangunan Yang Dihadapi	36

	Halaman
BAB III PENGARUH LINGKUNGAN STRATEGIS	
1. Pengantar	56
2. Pengaruh Globalisasi	57
3. Pengaruh Regional	62
4. Peluang dan Kendala	64
BAB IV KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI	
1. Kondisi Ketahanan Nasional Sekarang	69
2. Kebijakan	74
3. Strategi	76
BAB V PENUTUP	
1. Perencanaan Pembangunan Yang Terpadu ...	81
2. Kesimpulan	85
3. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: Transfer Netto Modal Ke Luar (Dalam Milyar US\$)	91
Tabel 2: Defisit Neraca Barang Dan Jasa (US \$ Milyar)	92
Tabel 3: Lapangan Kerja dan Perkiraan Penyerapannya Pada Akhir Repelita V	92
Tabel 4: Perhitungan Nilai Output Sistem Tannas Indonesia Berdasarkan Bobot Dan Nilai Instrumental Input Sekarang	93
Tabel 5: Sumber-Sumber Pembiayaan, Pengeluaran Pembangunan, 1989/1990 - 1994/1995 (Dalam Milyar Rupiah)	94
Tabel 6: Pengeluaran Pembangunan APBN 1993/94 dan RAPBN 1994/95 (Dalam Milyar Rupiah)	95

BAB I

P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang Permasalahan dan Perumusan Masalah

Pembangunan dengan pendekatan ilmu ekonomi telah relatif lama dikenal orang, dan analisis tentang hal ini biasanya ada pada ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan itu berhubungan dengan ekonomi dan proses politik yang perlu untuk melakukan transformasi struktural dan institusional yang cepat pada seluruh kehidupan masyarakat, yang secara efisien akan membawa hasil dari kemajuan ekonomi bagi sebagian besar lapisan masyarakat. Komponen yang esensial dalam ekonomi pembangunan ialah adanya perencanaan ekonomi yang terkoordinasi, serta kebijaksanaan ekonomi yang luas dan mendasar. Meskipun demikian dalam ekonomi pembangunan, hubungan antara usaha pembangunan ekonomi dan berbagai aspek kehidupan bangsa tidak secara eksplisit dianalisis, seperti kaitannya dengan masalah kebudayaan yang mengenai inti kepribadian suatu bangsa, dan sebagainya. Tujuan rencana pembangunan ekonomi seperti keputusan untuk investasi, konsumsi, penanaman

modal asing dan sebagainya ditentukan berdasarkan keputusan politik. Jadi jelas ini bukan bersifat ekonomi. Apa lagi kalau kita melihat perencanaan ekonomi yang memanfaatkan sumberdaya alam, dimana terkait juga dengan masalah lingkungan dan tata ruang.

Keputusan mengenai cara-cara pelaksanaan suatu program pembangunan, misalnya tentang sentralisasi atau desentralisasi, keputusan tentang apakah rencana pembangunan itu akan dilaksanakan dengan menggunakan aparatur negara saja atau mengikut sertakan rakyat secara aktif, ini semua bukanlah keputusan ekonomi semata-mata. Keputusan mengenai pembebasan tanah masyarakat untuk suatu proyek pembangunan akan berkaitan dengan masalah keamanan, ganti rugi dan sebagainya. Semuanya akan sangat erat terkait dengan tujuan suatu masyarakat.

Bagaimanapun juga nyatalah sudah bahwa berhasil tidaknya suatu pembangunan, tidak hanya tergantung pada keahlian dan kecakapan para pemimpin dan anggota-anggotanya untuk menyelenggarakan pembangunan itu. Tetapi ia tergantung pula pada perubahan-perubahan lainnya di lapangan IPOLEKSOSBUD HANKAM baik langsung atau tidak langsung tersangkut dalam penyelenggaraan pembangunan itu. Malah dapat dikatakan berhasil atau tidaknya usaha pembangunan merupakan salah satu wajah

dari proses pertumbuhan kesejahteraan suatu bangsa, sedangkan wajah yang lain ialah perlunya perubahan lain yang dihadapi dan dilaksanakan sekaligus, yakni aspek keamanan.

Ini berarti kita berhadapan dengan masalah dinamika suatu kehidupan bangsa secara keseluruhan. Kondisi dinamik suatu bangsa yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat untuk tetap jaya inilah yang menjadi perhatian bagi kajian ketahanan nasional.

Sementara itu masalah-masalah pembangunan negara berkembang, termasuk Indonesia adalah unik bagi dunia modern dan seringkali tidak mudah untuk dijelaskan oleh ekonomi pembangunan konvensional. Sebagai contoh industrialisasi tidak selalu mengakibatkan berkurangnya pengangguran, terutama di negara-negara berkembang yang jumlah penduduknya cukup banyak. Jadi ini bertentangan dengan anggapan atau dugaan semula.

Di berbagai negara Amerika Latin dan Asia termasuk Indonesia, meskipun industrialisasi meningkat, pengangguran tetap saja meningkat. Fenomena ini telah menolak hipotesis semula, bahwa masalah pengangguran akan dapat diselesaikan apabila dilakukan perkembangan ekonomi dengan cara perluasan sektor modern yakni perkembangan industrialisasi, peningkatan perdagangan internasional dan penanaman modal asing.

Erat kaitannya dengan masalah pengangguran itu ialah pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi dan sistem pendidikan yang belum memadai untuk menampung jumlah penduduk yang cukup besar. Sistem pendidikan itu sendiri secara tidak disadari telah membantu mempercepat arus pemuda untuk mengadakan urbanisasi guna mencari kesempatan kerja di kota-kota. Sistem itu telah membuat harapan orang yang bersifat urban. Cukup banyak negara berkembang membuka daerah pedesaan dengan cara pembangunan pedesaan yang akhirnya membuat desa tersebut tergantung pada produk dari kota-kota metropolitan baik dari negaranya sendiri maupun dari negara asing. Padahal seharusnya di desa-desa harus dirangsang kegiatan-kegiatan yang bukan agraris yang dipenuhi sendiri dari desa itu. Kenyataan-kenyataan tadi telah menimbulkan pertanyaan apakah tidak dapat disusun suatu strategi pembangunan yang lebih cocok, sehingga terhindar dari jebakan-jebakan tersebut.

Negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia yang berpenduduk banyak, harus dapat menyusun suatu pola pembangunan yang dapat membuat mereka mampu bertahan hidup dalam waktu duapuluh lima tahun mendatang. Pada waktu itu penduduk akan bertambah menjadi duaratus limapuluh juta orang, tetapi akan

mengonsumsi sumberdaya alam relatif sedikit jika dibandingkan dengan negara industri maju dewasa ini. Negara berkembang termasuk Indonesia harus menjalankan kebijaksanaan pembangunan yang intinya adalah pembangunan ekonomi yang diarahkan pada penciptaan kesempatan kerja dalam bidang industri, pertanian dan jasa.

Dengan latar belakang seperti yang telah disajikan di atas, masalah pembangunan negara berkembang khususnya Indonesia dapat dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Bagaimanakah caranya agar suatu bangsa dengan masyarakat yang masih di dominasi oleh sifat tradisional, produktivitas rendah, pendapatan per kapita rendah dapat ditransformasikan ke dalam masyarakat yang modern dengan produktivitas tinggi, penghasilan per kapita tinggi?
- (2) Sampai berapa jauh aspirasi pembangunan bangsa yang miskin dapat ditolong atau dihambat oleh kegiatan-kegiatan ekonomi negara-negara kaya?
- (3) Dengan proses yang bagaimana serta dalam kondisi yang bagaimana petani subsisten di pedesaan terpencil dapat berubah paling sedikit menjadi petani semi komersial yang sukses?

(4) Bagaimana perencanaan nasional harus dibuat dalam sistem ekonomi terbuka dan globalisasi ekonomi?

Masalah-masalah inilah dan mungkin akan banyak lagi masalah lain yang terkait dengan masalah ini seperti kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, pertumbuhan penduduk, harapan-harapan yang rasional dimasa depan, dapat ditempatkan di atas dasar kehidupan bangsa di bumi pertiwi ini.

Diharapkan bahwa tulisan ini akan mampu membawa pembaca mendapatkan pengertian yang lebih baik mengenai masalah-masalah penting untuk pembangunan dengan pendekatan ketahanan nasional.

Meskipun demikian proses pembangunan di negara berkembang termasuk Indonesia tak dapat dianalisis secara realistis tanpa memperhitungkan peranan negara-negara yang secara ekonomis telah lebih maju yang langsung atau tidak langsung dapat mempercepat atau memperlambat pembangunan itu.

Dengan makin berkembangnya teknologi diberbagai bidang, khusus komunikasi dan alat transportasi, maka hari depan bagi semua orang di muka bumi ini menjadi semakin saling tergantung. Apa yang akan terjadi bagi kesejahteraan dan keamanan petani miskin di Indonesia

baik langsung atau tidak akan mempengaruhi kesejahteraan dan keamanan mitranya di Eropa dan Amerika Serikat.

2. Maksud dan Tujuan

Dengan latar belakang dan perumusan masalah seperti tertera di dalam seksi 1, maka maksud tulisan ini ialah menjelaskan dan menganalisis fenomena pembangunan dan ketahanan nasional. Adapun tujuannya ialah:

- (1) Menemukan model transformasi struktur masyarakat tradisional dengan produktivitas rendah, pendapatan per kapita rendah kedalam masyarakat dengan produktivitas tinggi, penghasilan per kapita tinggi.
- (2) Menemukan faktor-faktor yang membedakan aspirasi pembangunan bangsa yang miskin dengan kegiatan ekonomi negara-negara kaya.
- (3) Menentukan kondisi dan proses perubahan petani subsisten di pedesaan terpencil sehingga berubah paling sedikit menjadi petani semi komersial yang sukses.

- (4) Mengkonstruksi suatu model perencanaan nasional dalam sistem ekonomi terbuka dengan adanya globalisasi ekonomi, dengan memperhatikan pesan UUD 45, Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

3. Pendekatan

Pendekatan yang dipakai untuk menganalisis, membandingkan dan mengkonstruksi model-model yang tertera pada seksi 2, ialah pendekatan multidisiplin secara terpadu (integralistik). Pendekatan ini relevan dengan ketahanan nasional yang bersifat multidisiplin. Selain dari pada itu metode kesisteman digunakan juga.

4. Sistematika

Tulisan ini terdiri atas lima bab:

Bab I : Membahas tentang latar belakang masalah yakni bagaimana melakukan pembangunan dengan pendekatan ketahanan nasional; tujuan penulisan yang intinya ingin mengkonstruksi suatu model transformasi struktural masyarakat dengan pendapatan perkapita rendah menjadi

masyarakat dengan pendapatan perkapita tinggi; pendekatan multidisiplin; sistematika tulisan; pengertian-pengertian/istilah serta lampiran.

Bab II : Membahas tentang kondisi hasil pembangunan Indonesia sekarang ini dilihat dari sudut ketahanan nasional dan wawasan nusantara; fungsi-fungsi pembangunan umumnya; permasalahan yang sedang atau yang akan dihadapi pada masing-masing gatra, serta kondisi ketahanan nasional sesaat.

Bab III: Membahas tentang pengaruh lingkungan strategis, antara lain pengaruh global, pengaruh regional, pengaruh nasional, serta peluang dan kendala.

Bab IV : Membahas tentang kebijaksanaan dan strategi.

Bab V : Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

5. Pengertian

Berikut ini disajikan istilah-istilah yang digunakan dalam tulisan ini:

- (a) Pembangunan ialah suatu proses multi dimensional yang melibatkan perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap mental, kelembagaan, pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan dan pemberantasan kemiskinan yang absolut. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pembangunan ialah proses peningkatan nilai tambah di segala aspek kehidupan.
- (b) Pendapatan per kapita adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk.
- (c) Model adalah abstraksi atau skenario dari fenomena real.
- (d) Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa yang merupakan keterpaduan segala aspek kehidupan, ulet dan tangguh agar tetap jaya.
- (e) Transformasi adalah perubahan dari suatu bentuk ke bentuk lain.

(f) Dependensi adalah ketergantungan.

(g) Pertumbuhan ekonomi, sama dengan

$$\frac{(\text{Pendapatan Nasional})_t - (\text{Pendapatan Nasional})_{t-1}}{(\text{Pendapatan Nasional})_{t-1}} \times 100\%$$

dimana t adalah tahun. Pendapatan nasional diukur dengan harga konstan tahun $t - 1$.

6. Lampiran

Dalam lampiran disajikan tabel-tabel pendukung, termasuk tabel perhitungan kondisi ketahanan nasional saat ini.

BAB II

PEMBANGUNAN, KETAHANAN NASIONAL, WAWASAN NUSANTARA

1. Pandangan Umum

Hakikat suatu pembangunan itu adalah proses peningkatan nilai tambah disegala bidang kehidupan. Di bidang ekonomi misalnya suatu pembangunan dikatakan berhasil jika ada peningkatan pendapatan per kapita tiap tahun. Apa yang menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan per kapita itu? Pada umumnya ahli ekonomi berpendapat jika disuatu negara terdapat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu negara tergantung pada sumberdaya alam, sumberdaya manusia, modal, teknologi dan sebagainya. Meskipun demikian pertumbuhan ekonomi atau pembangunan ekonomi umumnya tidak mungkin terjadi selama aspek-aspek yang lain seperti lembaga sosial, kondisi politik, nilai-nilai moral (budaya) pertahanan dan keamanan suatu bangsa tidak menunjang. Aspek-aspek seperti lembaga sosial, kondisi politik, adat istiadat, keamanan dan sebagainya itu oleh para ahli ekonomi pembangunan dinamakan faktor-faktor non ekonomi.

Bauer dalam bukunya *DISSENT OF DEVELOPMENT* mengemukakan bahwa dalam pembangunan ekonomi "adalah bakat, kemampuan, kualitas, kapasitas, kecakapan, sikap, adat istiadat, tujuan, motivasi serta struktur politik dan kelembagaan merupakan penentu utama".

2. Fungsi Ketahanan Nasional

Dalam tulisan ini secara tegas ingin di telaah peranan faktor ekonomi maupun faktor non ekonomi dalam pembangunan. Dengan kata lain penelaahan pembangunan dengan pendekatan ketahanan nasional, dimana peranan aspek-aspek ketahanan nasional suatu bangsa ikut diperhitungkan. Oleh karena itu ketahanan nasional disini berfungsi sebagai metode. Fungsi-fungsi lain dari ketahanan nasional itu ialah sebagai kondisi, dan dapat pula sebagai doktrin.

ASPEK EKONOMI

(1) Sumberdaya Alam

Pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh sumberdaya alam. Letak dan kesuburan tanah, kekayaan hutan, lautan, sumber air dan sebagainya merupakan faktor penting untuk pembangunan ekonomi. Meskipun demikian tersedianya sumberdaya alam secara berlimpah belum cukup untuk pembangunan ekonomi. Yang lebih penting ialah cara pemanfaatan sumberdaya alam itu. Jika sumberdaya alam yang ada tidak digunakan secara tepat, suatu bangsa tak mungkin mengalami kemajuan. Pemanfaatan sumberdaya alam yang tepat ini hanya dapat dilakukan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.

Nilai suatu sumberdaya alam tergantung pada kegunaannya, sedangkan kegunaan itu senantiasa berubah, karena berubahnya selera, perubahan teknologi atau karena adanya penemuan baru. Pada saat terjadinya perubahan itu setiap bangsa dapat menyesuaikan dirinya secara ekonomis melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya alamnya.

Revolusi pertanian yang dialami Inggris dulu dengan menerapkan metode rotasi tanaman (1740-1760). Perancis mampu merevolusikan pertaniannya dengan mengikuti pola Inggris, meskipun keadaan tanahnya kurang subur. Sementara itu di Asia dan Afrika belum dapat mengembangkan pertaniannya karena masih menggunakan metode tradisional.

Dilain pihak kita juga menyadari bahwa pembangunan ekonomi dapat terjadi meskipun suatu negara kurang mempunyai sumberdaya alam. Hal ini disebabkan karena ia menguasai teknologi baru. Jepang misalnya berhasil mengatasi kekurangan sumberdaya alamnya, dengan menggunakan teknologi tinggi, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan.

(2) M o d a l

Akumulasi modal amat penting dalam pembangunan ekonomi. Dengan adanya modal berarti tersedia faktor produksi. Pembentukan modal juga merupakan investasi dalam bentuk barang-barang modal yang dapat meningkatkan output nasional. Jadi pembentukan modal adalah kunci ke arah pembangunan. Pembentukan modal mempunyai arti penting bagi

negara berkembang termasuk Indonesia. Pembentukan modal diperlukan untuk memenuhi permintaan penduduk yang meningkat di negara itu. Investasi di bidang barang-barang modal tidak hanya meningkatkan produksi tetapi juga memberikan kesempatan kerja.

(3) Organisasi dan Manajemen

Organisasi merupakan bagian penting dalam proses pembangunan. Dengan adanya organisasi yang baik dapat melengkapi modal, tenaga kerja dan peningkatan produktivitas.

Dalam pembangunan ekonomi modern, peranan kaum wiraswastawan amat penting dalam mengorganisir perusahaan dan mengambil risiko ditengah situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Menurut Schumpeter seorang wiraswastawan adalah manusia pembaharu (inovator). Sejarah mencatat bahwa revolusi industri di Inggris merupakan jasa kaum wiraswastawan, demikian juga halnya dengan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada abad ke 19 dan pertengahan abad ke 20 berkat jasa dari peningkatan jasa-jasa manajemen yang baik.

Negara berkembang umumnya tidak mempunyai kaum wiraswastawan yang memadai, sehingga peranan swasta sebagai pelaku ekonomi belum memadai. Indonesia tidak terkecuali dari keadaan seperti itu. Kaum wiraswastawan sangat kecil jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luasnya daerah yang harus dibangun.

Disamping perusahaan swasta, pengertian organisasi juga mencakup pemerintah, bank dan lembaga-lembaga internasional yang terlibat dalam memajukan ekonomi negara maju dan negara berkembang.

Para birokrat pemerintah di Eropa, Inggris dan Amerika Serikat misalnya mengambil program kesejahteraan umum (public service) seperti, kesehatan masyarakat, pendidikan, keamanan dan sebagainya. Jasa-jasa kereta api, pos dan telekomunikasi sebagian dijalankan oleh perusahaan negara. Di negara berkembang jasa-jasa yang menyangkut kepentingan orang banyak dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah.

Peranan bank juga penting di negara maju dan negara berkembang. Di Inggris, Eropa dan Amerika Serikat ternyata bank cukup berperan dalam memberikan bantuan keuangan pada kaum wiraswasta.

Di negara berkembang bank ikut membantu dalam pengembangan pertanian bahkan Bank Dunia dan perwakilannya sejak tahun 1950 telah membantu pengembangan berbagai sektor ekonomi di negara berkembang.

Di Indonesia Bank Rakyat Indonesia yang cabang-cabangnya tersebar di seluruh pelosok tanah air ikut berperan dalam memajukan produksi pertanian.

(4) Teknologi

Perubahan teknologi memainkan peranan penting dalam proses pembangunan ekonomi. Perubahan itu berkaitan dengan perubahan cara-cara berproduksi, sehingga meningkatkan produktivitas tenaga kerja, modal dan faktor produksi lainnya.

Dua orang pakar ekonomi Kuznets dan Schumpeter telah secara khusus menjelaskan peranan perubahan teknologi dan inovasi dalam pertumbuhan ekonomi itu yakni teknologi; invensi; inovasi; penyempurnaan dan penyebarluasan penemuan. Schumpeter menganggap bahwa inovasi sebagai faktor teknologi penting dalam pertumbuhan ekonomi. Sebagai bukti dicatat antara lain ialah revolusi industri di Inggris menyebar keseluruh Eropa melalui para pekerja yang

bermigrasi ke negara-negara Eropa. Perancis mengembangkan industrinya dengan memindahkan mesin-mesin dari Inggris. Pada waktu pengembangan industri di Perancis selesai, para bankir dan teknologinya menyebarkan pengetahuan dan teknologi tersebut ke Jerman, Swis, Austria, Italia hingga ke Spanyol. Sementara itu di dunia Timur Jepang mengambil alih mesin-mesin dari Inggris yang telah usang, kemudian ditiru dan dimodifikasinya sehingga pertumbuhan industrinya berhasil.

Negara sedang berkembang telah juga mengambil manfaat dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi negara maju antara lain: India, Argentina, Meksiko dan Brazil yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Pembangunan ekonomi modern telah mencatat juga peranan sarana angkutan (transportasi) dan perhubungan (komunikasi) dalam pertumbuhan ekonomi modern. Kemajuan teknologi telah menciptakan jalan raya, truk, petikemas, supertanker, pesawat jet dan sebagainya. Sementara itu perkembangan komunikasi melalui satelit, komputer dan sebagainya telah membantu memperluas pasar dalam dan luar negeri negara maju.

Negara berkembang ternyata banyak yang belum mampu memanfaatkan kemajuan di bidang sarana angkutan dan perhubungan ini. Hal ini antara lain disebabkan karena faktor-faktor non ekonominya belum menunjang ke arah itu. Dengan kata lain aspek-aspek kehidupan manusia yang lain harus ikut diperhitungkan.

ASPEK-ASPEK YANG LAIN

Faktor ekonomi saja ternyata belum cukup untuk menyelenggarakan pembangunan. Faktor ekonomi harus dilengkapi dengan faktor-faktor non ekonomi, yang dalam tulisan ini kita sebut aspek-aspek lain dari ketahanan nasional suatu bangsa.

Aspek-aspek dari ketahanan nasional yang lain seperti aspek ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan ikut berinteraksi dalam menyelenggarakan pembangunan. Nurkse, dalam bukunya *Lectures on Economic Development* meskipun tidak secara tegas menyatakan aspek ketahanan nasional ini, namun menyatakan juga bahwa: "dalam pembangunan ekonomi, faktor sosial budaya, politik dan psikologi adalah sama pentingnya dengan faktor ekonomi". Pakar ekonomi yang lain Kaldor dalam bukunya *Essays on Economic Stability*

and Growth, menyatakan juga: "pengkajian terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi, di luar analisis faktor ekonomi, membawa kita kepada pengkajian terhadap unsur-unsur penentu yang bersifat sosiologis, psikologis dalam faktor ini".

(1) Ideologi dan Politik

Pembangunan ekonomi khususnya perubahan struktur ekonomi tidak dapat lepas dari perubahan dalam pandangan hidup (ideologi) dan pusat-pusat kekuasaan yang ada di dalam masyarakat. Apa yang diperlukan oleh negara berkembang termasuk Indonesia adalah suatu masyarakat yang cukup tinggi tingkat pengetahuannya serta menguasai teknologi. Pengetahuan dan teknologi itu digunakan untuk meningkatkan pembangunan dibidang pertanian, industri dan jasa. Pengetahuan dan teknologi modern tidak dapat diterapkan dalam masyarakat dengan pandangan hidup yang usang. Pola pikir mengenai strategi pembangunan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang dibuat haruslah serasi dengan ideologi yang berakar dari suatu bangsa. Faktor politik juga ikut membantu pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi modern. Sebagai bukti antara lain ialah pertumbuhan

ekonomi Inggris, Jerman, Amerika Serikat, Jepang dan Perancis merupakan hasil stabilitas politik yang kuat sejak abad ke 19. Meskipun setelah Perang Dunia II, kecuali Amerika Serikat semua negara ini hancur, namun mereka dapat bangkit kembali berkat kekuatan politik mereka. Sementara itu Italia ternyata belum berhasil tumbuh menyamai mereka, karena politik tidak stabil, administrasi yang lemah dan banyak korupsi.

Struktur politik dan manajemen yang lemah merupakan penghambat pembangunan di negara berkembang. Pemerintah sebagai pemegang kekuatan harus terlebih dahulu bersih, agar mampu mendorong kemajuan teknologi, mobilitas faktor dan pasar yang luas.

(2) Sosial Budaya

Pendidikan dan kebudayaan mempengaruhi pembangunan. Di negara Barat peranan pendidikan dan kebudayaan ini terbukti mampu menghasilkan kelas pedagang. Struktur nilai sosial dihasilkan oleh pendidikan. Kebiasaan untuk hidup hemat serta pandangan dan sikap terhadap kerja adalah hasil dari pendidikan dan kebudayaan.

Revolusi moral yang telah dilakukan oleh agama Kristen Protestan, memungkinkan negara Barat menerima etika kerja kearah aktivitas produksi modern. Adalah Max Weber yang menunjukkan peranan etika agama Protestan dalam pengembangan kapitalisme di Eropa. Menarik untuk dicatat disini bahwa kesan kemajuan tersebut telah menarik perhatian para pemimpin Jepang yang mengadakan perjalanan ke dunia Barat selama dua tahun pada permulaan era Meiji (tahun 1870an). Mereka mencoba mempelajari perubahan apa yang harus dilakukan dalam mentransformasikan masyarakat Jepang yang masih feodal ke masyarakat modern. Satu abad sebelum nabi Isa lahir ajaran Confucius telah masuk ke dalam etika, dan pada abad-abad berikutnya telah mengadakan perubahan, namun tidak membuat transformasi. Agama Budha yang masuk ke Asia Timur sangat sedikit memberikan pengaruh terhadap sistem moral dan etika kerja. Berlainan dengan ajaran Confucius yang berisi sistem etika kerja serta perilaku yang cocok dengan hidup di muka bumi. Kewajiban untuk bekerja keras di muka bumi untuk mengabdikan kepada orang tua dan nenek moyang, ternyata cukup berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Asia Timur khususnya Jepang.

Sebaliknya betapa ajaran Hindu oleh Max Weber dinyatakan sebagai tidak menyokong tuntutan berkembangnya kapitalisme. Sistem kasta ternyata merupakan penghambat untuk pembangunan dan terlalu banyak membicarakan masalah kehidupan sesudah mati.

Bagi Indonesia adalah menarik untuk mengkaji peranan Pancasila dalam pembangunannya. Bagi penulis mungkin lebih tepat untuk mengkaji sampai seberapa jauh ajaran Islam yang dipeluk oleh 85 persen rakyat Indonesia mampu memberikan sumbangan dalam pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ajaran Islam menyatakan pada prinsipnya manusia itu dijadikan Tuhan untuk menjadi chalifah di muka bumi. Chalifah artinya pemimpin, dan pemimpin tak boleh miskin baik harta maupun pengetahuan. Banyak ayat-ayat Al Quran maupun hadis Muhammad SAW relevan dengan usaha pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Kejarlah ilmu mulai dari buaian hingga ke liang kubur. Kejarlah duniamu seakan-akan engkau akan hidup seribu tahun, tetapi perbanyaklah ibadat seakan-akan engkau akan mati esok hari. Pernyataan-pernyataan tersebut menjadi bukti ajaran Islam seharusnya tercermin ke dalam etika kerja ummatnya. Penyerahan kepada takdir dan oleh karena itu tak perlu bekerja keras

tidak menunjang pembangunan khususnya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu menjadi tantangan bagi kaum intelektual Islam untuk menyebarkan ajaran Islam yang benar dan relevan dengan pembangunan bangsa Indonesia sekarang ini.

(3) Sumberdaya Manusia

Pembangunan bukan hanya tergantung pada jumlah sumberdaya manusia saja, tetapi yang lebih penting adalah kualitas sumberdaya manusia itu. Antara tahun 1750 - 1950 penduduk Eropa meningkat 433 persen, sedangkan penduduk dunia lainnya meningkat 200 persen. Meskipun penduduk dunia meningkat sekitar lima kali lipat, tetapi peningkatan GNP perkapita negara-negara Eropa dan negara kaya baru, naik sebanyak sepuluh kali lipat. Peningkatan GNP perkapita ini berkat kualitas sumberdaya manusia yang dicerminkan oleh produktivitas yang tinggi di kalangan tenaga kerja. Para ahli ekonomi menamakan ini sebagai pembentukan modal manusia, yakni suatu proses peningkatan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan teknologi seluruh penduduk bangsa yang bersangkutan. Kalau kita berbicara tentang kualitas

sumberdaya manusia, menyangkut bukan saja pendidikan tetapi juga kesehatan.

Di negara berkembang jumlah penduduk yang banyak dengan kualitas yang rendah merupakan penghambat pembangunan. Ledakan jumlah penduduk akan memakan hasil-hasil pembangunan sehingga tak ada perbaikan hidup di negara berkembang apabila penduduk tidak dikendalikan. Disamping pengendalian jumlah penduduk melalui keluarga berencana, yang perlu pula dilakukan ialah peningkatan kualitas tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas. Pandangan masyarakat harus diubah agar bersedia menerima arti penting dari martabat manusia khususnya martabat buruh. Hanya dengan tenaga kerja (buruh) yang terlatih dan terdidik dengan produktivitas dan efisiensi yang tinggi akan membawa masyarakat ke pembangunan ekonomi yang kuat.

Khusus mengenai Indonesia ada baiknya dikemukakan disini masalah insentif kerja, yang dapat mendorong adanya transformasi dari sektor agraris ke sektor industri dan jasa. Apabila dilihat sepintas, maka kelebihan tenaga kerja di desa, kalau dipindahkan ke kota untuk melepaskan diri dari himpitan kesulitan hidup di desa, dapat

ditampung sebagai tenaga kerja dalam pengembangan industri di kota. Akan tetapi ternyata di sektor industri pun ada keterbatasan. Pabrik-pabrik biasanya membutuhkan tenaga kerja kejuruan, sedangkan tenaga kerja yang datang dari desa yang umumnya tidak mempunyai keterampilan kejuruan tidak dapat ditampung.

Persoalannya ialah bagaimanakah caranya kita dapat membawa golongan tenaga kerja ini ke taraf kejuruan? Pilihan pengembangan industri di negara kita sebagian besar tergantung dari jawaban kita terhadap masalah ini.

Pengalaman di negara berkembang lain yang juga menghadapi masalah yang sama, telah membuktikan bahwa meskipun kemiskinan mendorong orang-orang untuk pergi ke lapangan industri, kemiskinan itu saja tidak cukup untuk memaksakan mereka menambah pengetahuan serta kejuruan yang diperlukan untuk industri itu. Ternyata peningkatan upah tidak selalu memberikan dorongan. Cara ini hanya berlaku di negara dimana uang adalah ukuran dari segala nilai. Akan tetapi masih cukup banyak negara-negara berkembang dimana nilai-nilai di dalam masyarakatnya tidak dapat dinyatakan dengan uang. Banyak pertimbangan lain ikut menjadi ukuran mereka antara

lain, prestise sosial, tanggapan jiwa terhadap kerja, terhadap arti waktu luang, dan pandangan apa yang terpenting di dalam hidupnya. Pendek kata kita harus menyelami masalah motivasi, insentif serta etika kerja. Berbicara tentang sumberdaya manusia, berarti berbicara pula tentang makna hidup, serta pengabdianya kepada kebutuhan-kebutuhan manusia.

(4) Pertahanan dan Keamanan

Pertahanan dan keamanan memainkan peranan penting pula dalam menyelenggarakan pembangunan. Pertahanan untuk menghadapi gangguan-gangguan baik dari luar maupun dari dalam, diperlukan sehingga stabilitas keamanan terdapat untuk menjamin jalannya pembangunan. Sebagai contoh, ketertiban, stabilitas dan perlindungan hukum mendorong usaha-usaha kewiraswastaan.

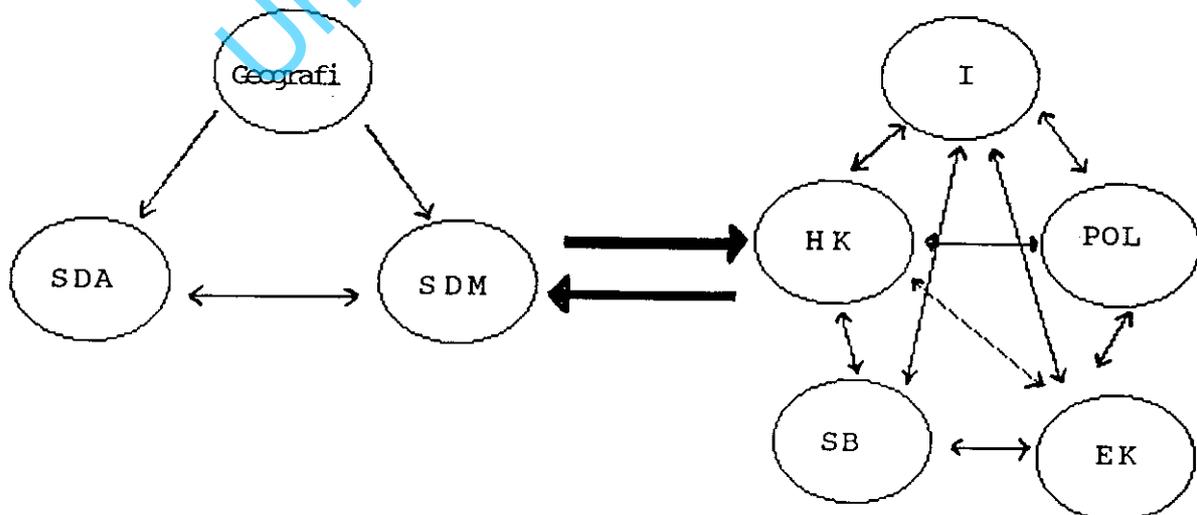
Pemerintah harus memberikan kepada masyarakat jasa-jasa yang diperlukan untuk merangsang pembangunan seperti ketertiban, keadilan, pertahanan dan keamanan sehingga memberikan jaminan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan itu.

3. Pembangunan Nasional dan Ketahanan Nasional

Jika pembangunan berhasil, berarti ketahanan nasional akan meningkat. Demikian juga sebaliknya, dengan ketahanan nasional yang meningkat pembangunan akan terus dapat dilanjutkan. Jadi terdapat hubungan timbal balik antara pembangunan dengan ketahanan nasional.

Konsepsi dasar ketahanan nasional itu merupakan segala aspek kehidupan nasional yang meliputi delapan aspek (asta gatra) terdiri atas tiga aspek alamiah (tri gatra) yakni: geografi, sumberdaya alam, sumberdaya manusia. Lima aspek yang lain (panca gatra) yakni: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Hubungan antar gatra dalam asta gatra itu dapat digambarkan sebagai berikut:



Pada hakikatnya ketahanan nasional itu tergantung pada kemampuan bangsa dan negara dalam memanfaatkan trigatra sebagai modal dasar untuk meningkatkan kondisi panca gatra. Trigatra relatif statik, sedangkan panca gatra bersifat dinamik. Trigatra dan Panca gatra merupakan satu kesatuan yang bulat (holistik) dinamakan asta gatra. Kelemahan salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan pada gatra lainnya sehingga mempengaruhi kondisi keseluruhan. Ketahanan Nasional itu merupakan resultante (hasil) dari ketahanan masing-masing aspek kehidupan (IPOLEKSOSBUD HANKAM). Dari konsepsi dasar ini jelaslah bahwa ketahanan nasional itu meliputi masa damai dan perang.

Pembangunan sebagaimana telah dikemukakan di muka, pada hakikatnya adalah proses peningkatan nilai tambah disegala aspek kehidupan. Sehubungan dengan makna pembangunan ini, Goulet mengemukakan tiga nilai hakiki yang terdapat dalam konsep dasar dan petunjuk praktis untuk memahami hakikat pembangunan. Nilai-nilai hakiki itu ialah; kebutuhan hidup, harga diri dan kebebasan. Ketiga nilai ini berhubungan dengan kebutuhan manusia yang mendasar pada hampir semua masyarakat dan kebudayaan disegala zaman.

Semua orang mempunyai kebutuhan pokok untuk hidup, tanpa itu tak mungkin hidup. Kebutuhan dasar untuk hidup yakni makanan, perumahan, perawatan kesehatan dan perlindungan, merupakan hal yang tak dapat ditawar. Oleh karena itu pembangunan ekonomi tak dapat tidak merupakan syarat perlu untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, tetapi masih belum cukup.

Sebagai nilai yang kedua dari aspek kehidupan itu adalah harga diri dimana sadar akan perasaan harga diri untuk tidak dianggap sebagai alat oleh orang lain atau bangsa lain demi kepentingan mereka sendiri. Bentuk harga diri ini dapat saja dikatakan sebagai identitas, kehormatan dan sebagainya. Negara berkembang memerlukan pembangunan untuk memperoleh harga diri yang diinginkan oleh masyarakat-nya.

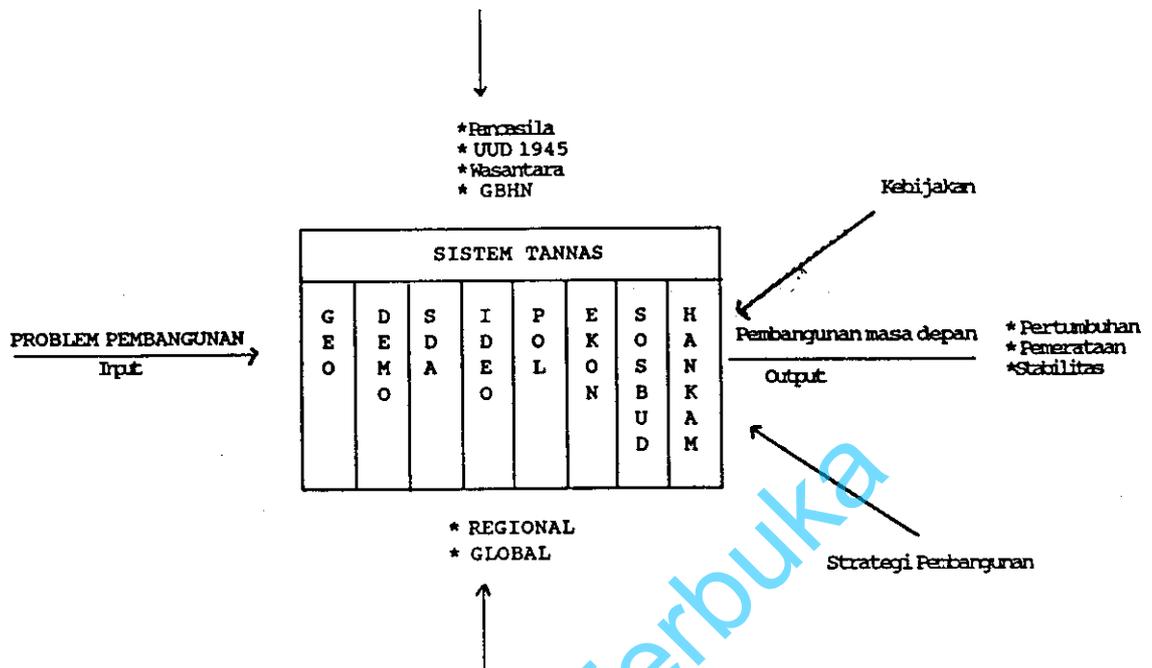
Nilai hakiki yang ketiga ialah kebebasan. Yang dimaksud dengan kebebasan disini bukanlah dalam pengertian politik atau ideologi, akan tetapi kebebasan dalam arti yang mendasar yakni bebas dari perasaan perbudakan sosial, bebas dari kebodohan dan ketergantungan pada orang lain, bebas dari rasa takut dan sedih, bebas dari kepercayaan-kepercayaan yang dogmatis sifatnya, termasuk lembaga-lembaga yang kaku. Arthur Lewis menyimpulkan bahwa keuntungan dari pertumbuhan ekonomi bukanlah kenikmatan dan kekayaan

bertambah, tetapi karena meningkatnya kebebasan manusia untuk memilih, misalnya dalam memilih waktu senggang, pemilihan barang-barang dan jasa-jasa yang lebih banyak.

Apapun komponen nilai-nilai yang dikemukakan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, pembangunan nasional seperti dirumuskan oleh Todaro paling sedikit mempunyai tiga sasaran sebagai berikut:

- (1) Meningkatkan persediaan dan memperluas kebutuhan bahan pokok untuk hidup seperti: makanan, perumahan, kesehatan dan keamanan.
- (2) Menambah dan mempertinggi penghasilan; penyediaan lapangan kerja; pendidikan yang lebih baik; serta perhatian yang lebih besar pada nilai budaya; sehingga terdapat kesadaran akan harga diri baik sebagai individu maupun sebagai bangsa.
- (3) Memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial baik individu maupun nasional dengan cara membebaskan mereka dari sikap-sikap ketergantungan, bukan saja dalam hubungannya dengan orang lain dan negara-negara lain, tetapi juga dari sumber-sumber kebodohan dan penderitaan manusia.

Dengan memperhatikan komsepsi ketahanan nasional suatu bangsa, serta hakikat nilai-nilai hakiki pembangunan nasional yang dijabarkan dalam sasaran-sasaran pembangunan yang ingin dicapai, maka dimungkinkan untuk mengkaji pembangunan dengan pendekatan ketahanan nasional. Ini berarti ketahanan nasional dianggap sebagai metode untuk menjelaskan dan meramalkan masalah-masalah pembangunan. Setiap masalah yang ada di dalam pembangunan nasional, mengakibatkan kondisi tertentu dari ketahanan nasional. Untuk dapat mengoperasionalkan pendekatan ketahanan nasional ini, kita perlu mengetahui pendekatan kesisteman, karena ketahanan nasional itu merupakan suatu sistem. Kriteria suatu sistem dipenuhi oleh ketahanan nasional, yakni adanya komponen-komponen yang berinteraksi satu sama lain (asta gatra) mencapai tujuan yang telah ditetapkan yakni kesejahteraan dan keamanan. Secara garis besar pendekatan ketahanan nasional itu dapat dimodelkan sebagai berikut.



Dalam model ini kedelapan aspek kehidupan ditempatkan sebagai "input instrumental" yang akan memproses baik langsung atau tidak langsung input mentah (problema masyarakat) menjadi output berupa kondisi ketahanan nasional sesaat, yakni kesejahteraan dan keamanan. Jika masalahnya telah didefinisikan, maka dengan menggunakan pendekatan multidisiplin dan interdisiplin dari kedelapan aspek tadi, kondisi ketahanan nasional sesaat dapat diukur. Dengan mengetahui tingkat ketahanan nasional sesaat maka kita dapat memilih kebijaksanaan dan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

4. Wawasan Nusantara

Ada bangsa yang secara eksplisit mempunyai cara bagaimana ia memandang tanah airnya beserta lingkungannya. Cara pandang itu biasa dinamakan wawasan nasional. Sebagai contoh; Inggris dengan pandangan nasionalnya berbunyi: "Brittain rules the waves". Ini berarti tanah Inggris bukan hanya sebatas pulaunya, tetapi juga lautnya. Tetapi cukup banyak juga negara yang tidak mempunyai wawasan, seperti: Thailand, Perancis, Nianmar dan sebagainya. Indonesia wawasan nasionalnya adalah wawasan nusantara yang disingkat wasantara. Wasantara ialah cara pandang bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang sarwa nusantara dan penekanannya dalam mengekspresikan diri sebagai bangsa Indonesia di tengah-tengah lingkungannya yang sarwa nusantara itu. Unsur-unsur dasar wasantara itu ialah: wadah (contour atau organisasi); isi dan tata laku. Dari wadah dan isi wasantara itu, tampak adanya bidang-bidang usaha untuk mencapai kesatuan dan keserasian dalam bidang-bidang:

- (a) Satu kesatuan wilayah
- (b) Satu kesatuan bangsa
- (c) Satu kesatuan budaya

- (d) Satu kesatuan ekonomi
- (e) Satu kesatuan hankam.

Jelaslah disini bahwa wasantara adalah pengejawantahan falsafah Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara Republik Indonesia. Kelengkapan dan keutuhan pelaksanaan wasantara akan terwujud dalam terselenggaranya ketahanan nasional Indonesia yang senantiasa harus ditingkatkan sesuai dengan tuntutan zaman. Ketahanan nasional itu akan dapat meningkat jika ada pembangunan yang meningkat, dalam "koridor" wasantara.

5. Hasil PJPT I Indonesia Serta Permasalahan Pembangunan Yang Dihadapi

Masalah-masalah yang dirumuskan dalam Bab I seksi 2, serta adanya tiga isu sentral dalam pembangunan yakni kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pembagian pendapatan merupakan masalah penting yang harus dijawab.

Pembangunan haruslah diartikan sebagai suatu proses multidimensi yang melibatkan perubahan-perubahan dalam struktur sosial, sikap mental yang usang, dan lembaga-

lembaga nasional termasuk pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan, serta pemerataan pendapatan. Ini berarti ketahanan nasional harus ditingkatkan dari kondisi kehidupan yang serba kurang, menuju ke kondisi kehidupan yang lebih baik.

Menurut catatan sejarah negara-negara yang sekarang sudah maju, terdapat interdependensi karakteristik pertumbuhan yakni pertumbuhan output perkapita, pertumbuhan penduduk, pertumbuhan produktivitas, adanya transformasi struktur ekonomi, tingginya transformasi sosial, politik dan ideologi serta pertumbuhan internasional. Ini suatu bukti bahwa pembangunan itu dilakukan oleh semua aspek ketahanan nasional yang berinteraksi satu sama lain.

Beberapa unsur penting dari perubahan struktural ini termasuk pemindahan secara bertahap dari aktivitas pertanian, ke aktivitas industri, kemudian pindah ke aktivitas jasa.

Di Amerika Serikat proporsi tenaga kerja yang bekerja dibidang pertanian dalam tahun 1870 ada 53,5 persen. Dalam tahun 1960 angka ini menurun menjadi kurang dari 7 persen. Demikian juga halnya dengan Belgia, tenaga kerja dibidang pertanian turun dari 51 persen dalam tahun 1846 menjadi 12,5 persen dalam tahun 1947 dan akhirnya kurang dari 7 persen dalam tahun

1970. Kenyataan ini menjadi bukti bahwa memang diperlukan waktu yang cukup lama yakni sekitar 100 tahun untuk menurunkan 40 persen tenaga kerja dibidang pertanian.

Bagi Indonesia apabila kita melihat duapuluh lima tahun yang lalu, ketika bangsa Indonesia memulai babak baru pelaksanaan pembangunan nasional, keadaan perekonomian nasional pada waktu itu berada pada tingkat yang memprihatinkan. Pertumbuhan ekonomi masih rendah, produksi pangan belum mencukupi, sarana prasarana ekonomi serba terbatas, dan inflasi sangat tinggi hingga mencapai 600 persen. Keadaan tersebut telah menyebabkan pendapatan perkapita dalam tahun 1967 hanya sekitar US\$ 50 yang termasuk terendah di dunia.

Sekarang setelah seperempat abad melaksanakan pembangunan nasional, pendapatan perkapita mencapai sekitar US\$ 600. Jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 60 persen dalam tahun 1970 menjadi sekitar 15 persen dari seluruh penduduk atau sekitar 27 juta orang dalam tahun 1990. Peningkatan kesejahteraan rakyat seperti adanya sarana kesehatan, pendidikan, tenaga listrik, air bersih juga memadai.

Sejalan dengan itu selama Pembangunan Jangka Panjang Tahap Satu (PJPT 1) telah pula berhasil dilaksanakan proses transformasi yang menyebabkan

perekonomian Indonesia mengalami beberapa perubahan struktural. Di sektor riil telah terjadi transformasi dari negara pengimpor beras menjadi negara yang berswasembada beras. Pangsa sektor industri terhadap produk domestik bruto (PDB) selama PJPT 1 meningkat dari 9,2 persen dalam tahun 1969 menjadi sekitar 21,3 persen dalam tahun 1991, sedangkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB dalam kurun waktu yang sama telah mengalami penurunan dari 49,3 persen dalam tahun 1969 menjadi 19,5 persen dalam tahun 1991. Atas dasar tolok ukur ini proses transformasi struktural dalam pembangunan Indonesia dapat dikatakan sedang memasuki tahap negara semi industri.

Di sektor moneter peranan ekspor non migas terus meningkat sebagai sumber devisa, sedangkan struktur pembiayaan pembangunan mulai didukung oleh penerimaan di luar minyak dan gas alam yakni sektor perpajakan serta dana masyarakat yang dikerahkan melalui bank, lembaga keuangan bukan bank dan pasar modal yang mulai berkembang. Perlu juga dikemukakan disini bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia selama PJPT 1 dicapai dalam kondisi perekonomian dunia yang berubah dan penuh dengan ketidakpastian. Ini menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia cukup ulet terhadap situasi eksternal.

Meskipun demikian pembangunan nasional Indonesia itu bukannya tanpa masalah sama sekali. Masalah-masalah yang muncul tampaknya bersumber dari masing-masing gatra ketahanan nasional itu juga terutama dari gatra IPOLEKSOSBUD HANKAM.

(1) Ideologi

Meskipun semua kekuatan masyarakat telah menerima Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara, namun melaksanakan prinsip-prinsip yang ada dalam Pancasila itu prakteknya masih terus menerus harus dilakukan penilaian dan pembinaan. Dalam situasi kita menerima konsep hidup yang tidak menutup diri terhadap dunia luar, konsekwensinya pengaruh-pengaruh yang dapat menggerogoti Pancasila selalu ada. Persoalan yang lebih penting lagi dari ideologi ini ialah bagaimana mengoperasionalkan ideologi Pancasila ini dalam praktek kelembagaan. Sebagai contoh bagaimana sistem ekonomi harus diatur sehingga mencerminkan ideologi Pancasila.

(2) Politik

Selama PJPT 1, kekuatan politik berupa birokrasi pemerintah menjadi alat pembangunan yang utama. Meskipun demikian karena tugas pembangunan yang diberikan kepada birokrasi pemerintah, menyebabkan konsentrasi kekuasaan di dalam birokrasi, menghabiskan kekuatan dari partai politik yang pada akhirnya menjadi lemah sebagai kekuatan pengimbang untuk menjalankan kontrol sosial terhadap birokrasi. Akibatnya pemborosan dan korupsi menjadi-jadi tidak dapat dikendalikan oleh kekuatan politik dari luar. Peranan yang diambil militer di dalam pembangunan seharusnya dilihat sebagai perpanjangan tangan kekuatan birokratik untuk mempertahankan keefektifannya.

Pada mulanya campur tangan militer dalam beberapa kasus diterima dengan tangan terbuka, karena membantu mempertahankan keseimbangan yang rapuh mempertahankan stabilitas dalam negeri atau adanya ancaman dari luar terhadap keamanan bangsa. Akan tetapi setelah sekali berada dalam kekuasaan, peranan tersebut mengembangkan dinamikanya dengan mengambil segmen-segmen khusus dari kegiatan-kegiatan ekonomis, sehingga ada kesan di masyarakat

bahwa ada usaha terus-menerus untuk "melumpuhkan" masyarakat sipil dalam politik. Meskipun tak ada yang menolak konsep dwifungsi ABRI namun pelaksanaan dari konsep tersebut masih sulit, karena mungkin bisa membuat masyarakat sipil merasa "kaplingnya" diambil oleh kaum militer. Dengan kata lain kehidupan profesional tidak dapat berkembang sehat.

Dilain pihak terdapat juga masalah apa yang dinamakan "putera daerah" versus "orang pusat" yang akan ikut tampil dalam pusat-pusat kekuasaan. Munculnya calon kepala daerah dari pusat, dianggap oleh masyarakat daerah mengambil atau mempersempit "kapling" orang daerah untuk ikut serta dalam pusat kekuasaan di daerah guna menangani pembangunan. Pandangan ke daerahan yang sempit tidak cocok dengan wasantara. Meskipun demikian aspirasi orang daerah untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan perlu pula di dengar sehingga penyelesaian yang arif perlu dilakukan sehingga aspirasi orang daerah bisa tersalurkan dan negara kesatuan dengan wasantara dapat terjamin.

Pembahasan sistem politik dan pembangunan politik harus secara jelas memasukkan butir-butir masalah yang hingga sekarang disinggung. Timbulnya

sistem birokrasi yang kita kenal sekarang, adalah pengaruh dari setidaknya-tidaknya empat faktor. Pertama, keinginan untuk pembangunan ekonomi yang cepat, tidak terhalang oleh riuhnya suara para politisi yang berpandangan sempit atau yang melayani dirinya sendiri seperti yang dialami pada rejim orde lama. Kedua, pemikiran kaum teknokrat yang unilinear. Ketiga, pemikiran kaum militer yang berorientasi pada mission. Keempat, pengertian tradisional tentang otoritas dan negara. Kesemuanya ini saling memperkuat kecenderungan menuju sentralisasi kekuasaan.

Meskipun dalam PJPT 1 birokratik mampu memberikan stabilitas politik dalam waktu yang relatif lama, sejarah di negeri lain juga menunjukkan bahwa kelemahan dan ketidakstabilan juga akan terlihat, dan pada akhirnya dengan proses konsentrasi kekuasaan menjadi semakin sempit, efektifitas semakin kecil serta kehancuran berada diambang pintu.

Oleh karena itu pengkajian aspek politik dari ketahanan nasional memungkinkan kita untuk mempelajari faktor-faktor mana yang akan menentukan, apakah birokratik yang ada sekarang akan berkembang menjadi suatu sistem yang

demokratik, dimana pada saat yang sama mampu mengatasi kekuatannya atau apakah ia akan terperosok ke dalam gerakan pemindasan terhadap kaum pembangkang, pemerkosaan hak-hak azasi manusia sehingga akhirnya terjadi pembusukan politik atau malah terjadi kekerasan politik.

Suatu birokratik yang ada sekarang akan mengalami titik kritis apabila ia tak dapat mempertahankan momentum pembangunan. Kedua, jika ia tidak mampu mengambil risiko terhadap otonomi dan kebebasan akademik yang diperlukan untuk pengembangan ilmu dan teknologi guna memenuhi tuntutan pembangunan. Ketiga jika ia gagal menangani pembaharuan struktural. Keempat, jika terdapat pembusukan dari dalam birokratik itu sendiri berupa korupsi, pemborosan, penyalahgunaan kekuasaan yang begitu merajalela sehingga meruntuhkan struktur kekuasaan yang ada. Kegagalan untuk mengatasi keempat faktor di atas akan mengarah kepada berakhirnya suatu rezim Orde Baru, sedangkan bila berhasil mengadakan penyesuaian akan mendemokratisasikan sistem politik/birokrasi yang ada sekarang.

Batu ujian terakhir bagi legitimasi kelanggengan sistem politik yang ada sekarang ditentukan oleh kemampuannya untuk menangani secara damai perubahan politik dan masalah suksesi. Semua sistem politik mengalami pergeseran dalam pendapat masyarakat, yang ingin adanya perbaikan. Akan bangkit kelompok kepentingan baru di dalam proses pembangunan yang berorientasi pada nilai politik baru yang biasanya menyertai perubahan generasi dalam masyarakat yang berubah.

Dalam hal lain ialah masalah suksesi yang tampaknya jauh lebih sulit untuk diatur. Justeru pada hakikatnya sistem birokrasi yang ada sekarang melemahkan munculnya kepemimpinan alternatif yang mungkin tumbuh. Di dalam isu suksesi itu semua masalah yang dihadapi suatu bangsa yang tidak bisa dipecahkan cenderung datang beruntun. Hal ini dapat mempersulit para pemimpin politik untuk meninggalkan kekuasaan secara sukarela, karena ketiadaan calon yang bisa diidentifikasi. Disamping itu adanya keengganan kaum vested interest dalam politik dan ekonomi yang telah berkembang di sekitarnya untuk menghadapi risiko kepemimpinan baru yang tak dikenal.

Mekanisme pemilihan presiden, meskipun telah diatur melalui MPR, namun jika ditilik lebih dalam, akan tampak beberapa keganjilan seperti begitu banyak jumlah anggota MPR yang diangkat. Dengan sistem yang ada sekarang anggota DPR akan loyal pada partai daripada aspirasi rakyat yang sesungguhnya.

Pemilihan Gubernur dan Bupati Kepala Daerah yang akhir-akhir ini tampak ricuh, menunjukkan bahwa mekanisme yang ada sekarang dirasakan belum sesuai betul dengan kehendak rakyat yang sebenarnya. Ini semua memerlukan pemikiran lebih lanjut.

(3) Ekonomi

Apa yang dicapai dibidang ekonomi selama PJPT 1 bukanlah tanpa masalah. Ternyata hasil-hasil pertumbuhan ekonomi yang bagus didapat dengan biaya tinggi, sehingga dikenal sebagai "high cost economy". ICOR yang tinggi hingga 4,5 menunjukkan perekonomian belum efisien dan masih banyak terjadi kebocoran.

Pembangunan masih memerlukan tambahan investasi yang semakin besar yang pembiayaannya masih memerlukan pinjaman luar negeri. Dalam proses akumulasi investasi yang selama ini berlangsung masih terdapat kelemahan yang bersifat struktural dalam hal pembiayaan pembangunan. Besarnya investasi yang diselenggarakan tidak selalu dapat diimbangi oleh tabungan nasional sehingga terjadi kesenjangan antara investasi dan tabungan nasional (investment gap). Dilain pihak terdapat kecenderungan kebutuhan devisa untuk membiayai impor bahan baku, bahan penolong dan bahan modal yang diperlukan. Untuk mempercepat pembangunan, tidak selalu dapat dipenuhi oleh penerimaan devisa dari ekspor barang dan jasa, sehingga terjadi kesenjangan antara impor dan ekspor (devisa gap). Kedua kesenjangan dalam pembiayaan tersebut apabila tidak diatasi dengan baik, dikhawatirkan akan mengganggu kestabilan sektor eksternal, dan akibatnya menyulitkan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman luar negeri, yang pada gilirannya akan menjadi kendala untuk proses transformasi pembangunan dimasa mendatang.

Sebagaimana diketahui utang luar negeri sudah membengkak untuk menutup kedua celah tersebut di atas. Angka kumulatif utang hingga tahun 1993 mencapai US\$ 90 milyar (sekitar lebih dari Rp 180 triliun). Kemampuan membayar kembali utang luar negeri apabila diukur dengan debt service ratio (DSR) mencapai lebih dari 30 persen, padahal batas yang wajar ialah sekitar 20 persen. Sejak 1985 hingga sekarang utang luar negeri bukan lagi sebagai pelengkap malah menjadi negara yang mentransfer modal keluar negeri. Data Tabel 1 pada lampiran menjadi bukti adanya gejala tersebut.

Adapun penyebabnya antara lain ialah banyak utang telah jatuh tempo, apresiasi Yen terhadap US dollar; dan devaluasi rupiah.

Defisit neraca transaksi berjalan merupakan penyakit kronis perekonomian Indonesia, sebagaimana terlihat di dalam Tabel 2 pada lampiran.

Sejak tahun 1990 rata-rata defisit neraca pembayaran melebihi 2% dari produk domestik bruto (PDB), yang biasanya dijadikan tolok ukur untuk kewajaran defisit neraca barang dan jasa. Defisit ini umumnya disebabkan impor yang meningkat bagi bahan baku dan barang modal untuk industri. Pos

jasa yakni besarnya pembayaran bunga pinjaman luar negeri merupakan salah satu penyebab defisit itu.

Dibidang moneter dan perbankan disatu pihak pemerintah telah berhasil meningkatkan investasi dan mendorong permintaan agregat sehingga pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Namun disisi lain telah pula menimbulkan kenaikan tingkat harga. Stabilitas ekonomi merupakan salah satu prasyarat bagi kelancaran dan keberhasilan pembangunan nasional. Stabilitas ekonomi itu tercermin oleh laju inflasi yang rendah sehingga daya saing produk ekspor meningkat. Dibidang perbankan sebagai penyalur kredit ternyata masih banyak terdapat kelemahan, sebagaimana kasus Bapindo yang akhir-akhir ini mencuat. Kredit investasi yang tidak terkendali dengan baik akan menghancurkan perbankan dan bisa melumpuhkan perekonomian, jika bank-bank tidak mematuhi aturan permainan yang ada.

Isu ekonomi makro yang lain ialah pengangguran. Perkiraan kesempatan kerja selama akhir Repelita V masih mengandalkan pada empat sektor sebagaimana tertera dalam Tabel 3 pada lampiran. Dari tabel itu tampak penyerapan yang tidak merata dan daya serap masih belum cukup memadai.

Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) 1990, pengangguran tersembunyi ada 28 juta orang. Tahun 1992 diperkirakan mencapai 35 juta orang. Hampir 50 persen dari total angkatan kerja dalam status pengangguran tersembunyi yakni orang yang bekerja kurang dari pada 35 jam seminggu. Total angkatan kerja sekarang ialah 74 juta orang. Angkatan kerja ialah orang yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka (betul-betul menganggur) pada akhir Repelita V sekitar 3 juta orang. Basis pengangguran ini sebagian besar berpendidikan menengah ke bawah. Hal ini cukup rawan jika dilihat dari aspek keamanan.

Apabila dilihat dari institusi pelaku ekonomi menurut UUD 1945 juga belum tercapai keharmonisan. Koperasi misalnya yang diharapkan dapat menjadi soko guru dalam perekonomian Indonesia, ternyata hingga sekarang masih belum memadai. Soedjatmoko dengan tajam membahas pembangunan ekonomi sebagai perubahan sosial, mengkritik persamaan yang dangkal antara bentuk koperasi dan susunan kehidupan gotong royong. Persamaan itu menurutnya menambah kesukaran-kesukaran orang untuk memahami arti perubahan dalam suatu desa yang diakibatkan oleh berdirinya suatu koperasi, dan sering juga

diberikan kepada warga pribumi. Di lain pihak masih ada golongan yang percaya bahwa kerjasama antara pribumi dan non pribumi diperlukan dalam menjalankan roda perekonomian. Keterampilan dalam dunia bisnis bagi golongan pribumi masih belum memadai baik dalam jumlah maupun kualitas.

Peranan pemerintah yakni perusahaan negara sebagai salah satu institusi pelaku ekonomi sekarang ini juga menjadi masalah, karena tidak semua badan usaha milik negara (BUMN) mencapai sasaran yang diinginkan.

Dengan dana yang terbatas untuk melanjutkan pembangunan di dalam PJPT 2, maka subsidi BUMN yang begitu lama dan dalam keadaan merugi perlu dipertanyakan.

(4) Sosial Budaya

Bagi Indonesia, pembangunan sebagai perubahan sosial akan mengakibatkan perubahan mentalitas. Mentalitas kita akan berubah dengan adanya industrialisasi dengan segala akibat sosialnya. Jika dilihat lebih dalam sebetulnya mentalitas kita sudah berubah dan akan berubah terus dengan berlangsungnya keruntuhan susunan masyarakat kita

yang lama setelah kita merdeka dan memulai pembangunan. Jika kita ingin berpacu dengan waktu untuk melaksanakan pembangunan dengan cepat, maka diperlukan pencerahan secara sadar dimensi-dimensi kebudayaan untuk memudahkan proses perubahan mentalitas itu. Banyak sekali kita lihat hambatan-hambatan pembangunan ternyata datang dari kebudayaan yang berpengaruh di lapisan masyarakat dalam berbagai bentuk. Salah satu contoh ialah sikap yang banyak terdapat di dalam pegawai tinggi, pemimpin politik, bahkan juga pada dunia perguruan tinggi. Ucapan-ucapan seperti apa perlu kita mempercepat pembangunan? Mengapa pertumbuhan ekonomi perlu? Apakah kita ingin membimbing bangsa kita kearah persaingan yang tak terbatas sehingga menjadi sangat individual satu sama lain? Di lapisan bawah kita menemukan pandangan dan sikap di tempat kerja masih belum menyokong gerak pembangunan. Kesemuanya ini dapat disimpulkan sebagai mentalitas yang "menolak" terhadap kehidupan industrial. Penolakan terhadap kehidupan industrial ini dengan segala konsekwensinya, menjadi sumber dari perlawanan atau keengganan untuk melihat masalah-masalah pembangunan. Kehidupan industrial itu memang jauh berbeda dengan

kehidupan agraris. Misalnya dalam kehidupan industrial kita harus tepat waktu, janji harus ditepati, hubungan pribadi lebih rasional. Lain dengan hubungan yang emosional di dalam masyarakat agraris tradisional. Juga ikut menambah persoalan ialah sistem pendidikan yang ada secara tidak langsung telah membantu mempercepat perginya kaum muda yang diperlukan di desa guna mencari kesempatan kerja.

Pemilihan ilmu dan teknologi yang lebih efektif dan independen yang akan mengurangi ketergantungan ekonomi dan politik, ternyata mempunyai implikasi penting bagi perkembangan politik. Setiap bagian dari teknologi adalah bagian dari suatu sistem sosial, karena dia mempengaruhi sistem sosial kemana dia dimasukkan. Loncatan teknologi dari yang sederhana ke yang canggih yang padat modal dapat mengambil proses produksi khusus yang berada di luar kontrol produsen kecil yang ada. Keseimbangan pedesaan dan perkotaan akan bergeser demi keuntungan pusat perkotaan.

(5) Pertahanan dan Keamanan

Akhirnya faktor pertahanan dan keamanan bukannya tidak ada masalah. Jumlah angkatan bersenjata kita mungkin perlu disesuaikan dengan kondisi damai sekarang dan yang cenderung ada pada sepuluh tahun mendatang.

Profesionalisme angkatan bersenjata kita masih belum memadai persiapannya jika terjadi ancaman dari luar. Keterampilan ABRI dalam mengamankan jalannya serta hasil-hasil pembangunan belum memadai. Perubahan-perubahan nuansa yang ada membuat keadaan statusquo sekarang ikut menjadi masalah.

BAB III

PENGARUH LINGKUNGAN STRATEGIS

1. Pengantar

Setelah kita menganalisis permasalahan pembangunan yang ada di dalam Bab II seksi 4, maka pada bagian ini kita perlu membahas pengaruh-pengaruh lingkungan yang dapat mempengaruhi kondisi ketahanan nasional itu. Ketahanan nasional merupakan suatu sistem yang terbuka, artinya ia menerima input dari luar sistem itu serta berinteraksi dengan komponen-komponen proses atau instrumental input dari ketahanan nasional yang ada di dalamnya. Apabila kondisi ketahanan nasional suatu bangsa mampu mengadakan penyesuaian atau memilih peluang dan kendala dari lingkungan yang mempengaruhinya, maka jadilah ia sebagai suatu ketahanan nasional yang tangguh.

Pengaruh-pengaruh lingkungan strategis itu yang tampaknya menonjol bagi pembangunan nasional Indonesia sekarang dan dimasa datang ialah pengaruh globalisasi dan regionalisasi.

2. Pengaruh Globalisasi

Ternyata revolusi di bidang transportasi dan komunikasi telah menimbulkan kecenderungan globalisasi dari peristiwa, proses atau peranan aktor yang melanda berbagai aspek ketahanan nasional suatu bangsa. Ciri-ciri globalisasi ini ialah makin menghilangnya dimensi jarak (distance) dan waktu (time) serta keunikan lokasi. Revolusi di bidang transportasi telah menyebabkan biaya angkutan laut antar benua menjadi lebih murah daripada biaya angkutan darat di suatu benua. Akibat perkembangan ini kekhususan lokasi semakin tidak berperan sebagai unsur penarik investasi. Akibat lain ialah batas antar negara semakin tidak relevan serta kecenderungan hubungan antar perusahaan yang bersifat lintas batas semakin kuat.

Di pihak lain karena komunikasi antar negara berlangsung terus menerus tanpa mengenal batas waktu, maka arus dana, perbankan dan berbagai jasa lainnya berjalan secara leluasa dan cepat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa globalisasi telah membuka baik peluang maupun kendala bagi semua negara. Ini berarti apakah ia mampu memberikan tanggapan yang tepat terhadap perubahan yang berintikan perubahan teknologi yang begitu cepat itu.

Adalah ideal sekali bagi bangsa Indonesia untuk menanggapi perubahan yang cepat itu baik sebagai peluang (opportunity) maupun sebagai kendala dari berbagai aspek ketahanan nasional.

(a) Pengaruh Globalisasi Terhadap Ideologi dan Politik

Ideologi komunis sebagai legitimasi kekuasaan telah runtuh, sehingga pemyarakatan ideologi komunis dalam era globalisasi memudar. Meskipun demikian dari sisi lain perkembangan kapitalisme menguat. Ciri khas kapitalisme abad 21 nanti menunjukkan lebih pragmatis dan tetap bersifat imperialis dalam arti tetap ingin menguasai pihak lain. Kapitalisme pragmatis Barat dasarnya adalah manfaat, jadi erat hubungannya dengan materialisme.

Implikasi global ini dibidang politik mau tidak mau harus membuka komunikasi serta sistem politik baru yang terbuka. Tuntutan-tuntutan dari proses globalisasi tampak adanya gerakan hak-hak azasi manusia, gerakan lingkungan hidup dan gerakan-gerakan politik yang melemahkan paham nasionalisme.

(b) Pengaruh Globalisasi Terhadap Ekonomi

Menguatnya kapitalisme menuntut adanya ekonomi pasar yang lebih bebas untuk mempertinggi azas manfaat, kewiraswastaan, akumulasi modal, membuat keuntungan, serta manajemen yang rasional (profesionalisme). Ini semua menuntut adanya mekanisme global baru berupa struktur kelembagaan baru yang ditentukan oleh ekonomi raksasa. Pertimbangan biaya dan harga serta kualitas produk menjadi dasar keputusan untuk memproduksi suatu barang di suatu lokasi atau suatu negara tertentu. Sedangkan pertimbangan kemampuan menyalurkan secara cepat barang-barang yang produknya sedang digemari mulai dituntut. Sehubungan dengan ini tenaga kerja yang murah, berlimpahnya bahan baku tidak dapat diandalkan lagi. Akan tetapi yang penting ialah kecepatan proses produksi pada kualitas yang prima. Standar internasional serta kemampuan menyalurkan (delivery) yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen penting sekali.

Terbentuknya North American Free Trade Area (NAFTA) yakni Kawasan Perdagangan Bebas Amerika Utara sejak Agustus 1992 yang lalu membuat ekonomi dunia dalam blok-blok ekonomi. Ini sebagai

tandingan terhadap masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) yakni ekonomi pasar tunggal Eropa. NAFTA yang terdiri atas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dapat dianggap menyiapkan diri menghadapi dampak negatif yang muncul dari pasar tunggal Eropa itu.

Bagi negara Asia termasuk Indonesia dampak negatifnya diperkirakan adalah industri substitusi impor oleh Amerika Serikat akan bergeser dari Asia ke Meksiko karena upah buruh rendah di Meksiko. Selain itu mungkin investasi Amerika Serikat akan bergeser dari Asia lari ke Meksiko, padahal Asia bergantung pada modal Amerika Serikat.

Kekhawatiran lain ialah diskriminasi tarif dan non tarif yang dikenakan negara-negara NAFTA terutama Amerika Serikat akan merugikan negara Asia, sedang Meksiko diuntungkan.

(c) Pengaruh Globalisasi Terhadap Sosial Budaya

Alat transportasi dan komunikasi yang modern sebagai prasarana timbulnya globalisasi, telah juga memberikan peluang bagi kita untuk memanfaatkannya dibidang sosial budaya. Media komunikasi elektronik seperti televisi, komputer, satelit dan sebagainya

dapat digunakan untuk menerima informasi dan "transfer of knowledge".

Di lain pihak pengaruh tersebut juga dapat berupa kendala, yakni film-film yang bersifat kekerasan, serta aspek kebudayaan luar lainnya yang kurang mendukung budaya bangsa yang baik. Meskipun demikian kebudayaan Indonesia akan merupakan penjelmaan jiwa bangsa Indonesia baru yang telah dibebaskan dari lingkungan kemiskinan serta akan percaya pada diri sendiri untuk menentukan nasibnya sendiri.

(d) Pengaruh Globalisasi Terhadap Pertahanan dan Keamanan

Globalisasi yang didasari oleh menguatnya kapitalisme, jelas memberikan dampak juga terhadap pertahanan dan keamanan. Menyebarnya perdagangan dan industri di seluruh dunia akan meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik kepentingan yang dapat mengganggu keamanan bangsa.

Semua negara mau tak mau menghadapi tuntutan-tuntutan dari proses globalisasi antara lain hak-hak azasi manusia, lingkungan hidup serta perubahan sistem politik. Ini semua memberikan peluang dan

kendala pada aspek pertahanan dan keamanan untuk menjalankan proses transformasi pembangunan.

3. Pengaruh Regional

Seperti telah dijelaskan di muka bahwa imperialisme tetap ingin menguasai pihak lain, dan ini akan menjadi ciri kapitalisme abad 21 selain dari sifat pragmatisnya. Setelah perang dingin selesai, muncul perkembangan kapitalisme Jepang selain di Amerika Serikat dan Eropa.

Jika ditilik lebih dalam, terdapat perbedaan dalam ciri-ciri kapitalisme mereka. Amerika Serikat ciri khasnya adalah liberal dimana peranan individu besar, peranan pemerintah sedikit. Eropa dengan ciri khasnya adalah "social market economy" dimana peran buruh merupakan faktor penentu dalam perusahaan. Peran pemerintah adalah sebagai penengah dan ada sifat demokratik. Kapitalisme Jepang berorientasi pada confusianisme dalam pengertian kolektifisme, dan peranan pemerintah besar.

Sejak tahun 1970-an timbul apa yang dinamakan NICS (New Industrial Countries) yakni: Taiwan, Singapura, Hongkong, Korea Selatan. Mereka ini dengan latar belakang kebudayaan yang sama yakni confusian ethic bergerak mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi bagi

negaranya masing-masing. Stabilitas sosial dan politik merupakan syarat bagi keempat negara tersebut untuk mencapai kesejahteraan dan keamanan.

Di Asia Tenggara sekarang muncul apa yang dinamakan NIES (Newly Industrializing Economics) yakni: Thailand, Malaysia, Indonesia, Philipina. Meskipun demikian basis industrinya masih lemah. Peranan Cina perantauan masih besar sekali terutama di Indonesia. Indonesia sebetulnya dapat mengambil manfaat dari warga negara keturunan Cina sebagai kaum wiraswastawan untuk melaksanakan perdagangan. Hanya saja pengarahannya yang tepat dan pengendaliannya harus baik.

Mulai bangkitnya ekonomi Cina di RRC selain merupakan peluang bagi Indonesia untuk mengadakan hubungan dagang juga terdapat kendala, karena Cina perantauan yang ada di Indonesia sering dimanfaatkan oleh RRC untuk kepentingan politik mereka.

Regionalisme perdagangan di Asia Tenggara juga muncul, dikenal dengan Asean Free Trade Area (AFTA). Di kawasan ini tarif internal dihapuskan, tetapi negara anggotanya dapat menerapkan tarif tersendiri terhadap mitra dagang di luar kawasan. Tarif bukan hanya dihapuskan, tetapi juga diseragamkan. Kehadiran AFTA menimbulkan pro dan kontra di kalangan ASEAN. Industri-industri yang tidak efisien pasti tergusur dan ini

berarti akan banyak pengusaha yang dirugikan serta pengangguran akan meningkat. Sebaliknya industri-industri yang efisien akan memiliki peluang pasar dan dapat memperluas ekspansinya keluar Asean.

Banyak kalangan berpendapat bahwa adanya AFTA akan menguntungkan anggota-anggota Asean. Persaingan yang tajam akan membuat AFTA memiliki industri yang kuat, sehingga produknya mampu menembus blok-blok dagang di dunia lainnya. Sementara itu konsumen akan mendapat produk berkualitas baik dengan harga yang wajar. Penurunan tarif secara bertahap atas 15 kelompok mata dagangan dalam rangka CEPT (Common Effective Preferential Tariff) menunjukkan sekitar 60 persen dari ke-15 mata dagangan itu yang diproduksi oleh perusahaan domestik mampu bersaing di pasar Asean. Di samping itu perhubungan laut dan penyebaran industri di luar Jawa diperlukan untuk menangkal serbuan produk luar negeri.

4. Peluang dan Kendala

Pengaruh lingkungan strategis yang memberikan peluang untuk peningkatan pembangunan adalah sebagai berikut:

- (a) Hancurnya komunisme internasional memungkinkan ideologi Pancasila semakin mantap untuk di

masyarakatkan, meskipun tetap harus memperhatikan gangguan dari sisi yang lain yakni kapitalisme yang imperialistis.

- (b) Komunikasi yang terbuka dan gerakan ke arah demokratik semakin kuat dimana-mana. Ini merupakan peluang bagi Indonesia untuk menyesuaikan struktur politik yang ada sekarang ke arah yang sesuai dengan tuntutan generasi muda. Batu ujian terakhir bagi legitimasi dan kelanggengan suatu sistem politik termasuk sistem birokrasi sekarang, ditentukan oleh kemampuannya untuk menangani secara damai perubahan politik dan masalah suksesi.
- (c) Liberalisasi perdagangan dunia menuju ke arah efisiensi yang tinggi, merupakan peluang bagi Indonesia untuk mengadakan deregulasi peraturan-peraturan perdagangan dan ekonominya yang sekarang, ke arah transformasi yang diinginkan. Revolusi alat transportasi seperti munculnya kapal-kapal tanker ukuran besar, memberi peluang bagi kita untuk memproduksi peti-peti kemas untuk memuat barang-barang ekspor masuk ke dalam kapal tersebut. Perdagangan bebas memberikan peluang bagi kita

untuk ikut bersaing menjual produk-produk pertanian dan industri pertanian ke tingkat internasional.

(d) Kelancaran komunikasi dan keterbukaan informasi memberikan peluang bagi Indonesia untuk memperkenalkan budaya bangsanya ke masyarakat internasional. Pengembangan industri pariwisata merupakan peluang yang baik. Hubungan kebudayaan baik bilateral maupun multilateral memberikan peluang bagi kita untuk memperbaiki sistem pendidikan dan teknologi ke arah yang kita inginkan.

(e) Dari sekarang hingga sepuluh tahun mendatang kecenderungan dunia adalah damai, sehingga memberikan peluang untuk memperbaiki struktur angkatan bersenjata beserta profesionalismenya.

Di lain pihak lingkungan strategi juga memberikan kendala-kendala antara lain sebagai berikut:

(1) Di bidang ideologi, arus liberalisme kapitalisme makin menguat, sehingga generasi muda dan tingkat kesadaran politik masyarakat yang masih rendah dapat mengganggu ideologi Pancasila.

- (2) Di bidang politik angin segar dari keterbukaan masih dihalangi oleh kelompok yang masih menginginkan keadaan statusquo.
- (3) Di bidang ekonomi produk-produk yang sudah cukup bagus dalam arti mampu bersaing sering dihambat oleh quota negara-negara maju. Beberapa jenis dari produk tidak dapat bersaing, karena biaya produksi masih mahal dan teknologi belum tinggi. Jumlah dan kualitas kaum wiraswastawan pribumi masih terbatas untuk dapat melaksanakan kegiatan bisnis baik dalam negeri maupun luar negeri. Sistem perbankan, belum mampu memenuhi standar internasional. Manajer profesional khususnya di bidang perbankan masih sangat langka. Produk-produk yang diekspor ternyata masih mempunyai kandungan impor (import content) yang tinggi, sehingga devisa yang masuk terkuras lagi untuk mengimpor bahan baku. Prasarana ekonomi seperti listrik, telekom pelabuhan, airport, jalan raya, perumahan serta perangkat hukum masih belum memadai. Peraturan-peraturan yang terlalu berbelit-belit merupakan kendala bagi pengembangan dunia usaha.

(4) Di bidang sosial budaya, mentalitas budaya masyarakat baik di tingkat atas maupun tingkat bawah belum mendukung kondisi transformasi sektor pertanian ke sektor industri dan jasa.

(5) Di bidang pertahanan dan keamanan masih lemahnya aparat keamanan dalam menanggulangi lalu lintas orang asing, penyelundup, pencurian sumberdaya laut dan sebagainya.

Dengan ditariknya kekuatan angkatan perang Amerika Serikat dari pangkalan Subic bay dan Clark Tri Base di Philipina terasa terdapat kekosongan kekuatan di perairan laut Cina Selatan. Untuk mengisi kekosongan tersebut terdapat upaya beberapa negara antara lain: Cina, Jepang, Taiwan untuk menghadirkan kekuatan angkatan perangnya. Kehadiran tersebut karena ada kesamaan kepentingan atas pengakuan kedaulatan gugusan pulau Spratly dan Paracel. Untuk itu RRC telah menaikkan anggaran belanja militernya.

BAB IV

KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI

1. Kondisi Ketahanan Nasional Sekarang

Di dalam Bab II seksi 3 ketika membicarakan hubungan pembangunan nasional dan ketahanan nasional, serta wawasan nusantara telah dijelaskan bahwa sebelum memilih kebijaksanaan dan menetapkan strategi pembangunan nasional, terlebih dahulu mengukur kondisi ketahanan nasional saat ini.

Dalam tulisan ini penulis menggunakan metode yang penulis kembangkan sendiri (original dari penulis) dengan menggunakan analisis sistem. Metode ini penulis beri nama dengan: METODE PENGEMBANGAN INPUT. Ide pokok dari metode ini ialah problema masyarakat atau problema pembangunan sebagai input dikembangkan atau dimanipulir oleh instrumental input (8 gatra) menuju ke kondisi yang dituju yakni: kesejahteraan dan keamanan dengan memperhatikan peluang dan kendala.

Kesejahteraan dan keamanan itu dijabarkan atas pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas di segenap aspek. Dengan demikian output berupa kesejahteraan dan

keamanan itu merupakan output sistem ketahanan nasional. Sedangkan pertumbuhan (kemajuan) pemerataan dan stabilitas masing-masing merupakan output subsistem ketahanan nasional itu. Nilai output sistem dihitung berdasarkan atas bobot output dan nilai instrumental input sekarang. Pada tiap negara mempunyai bobot output yang berbeda berdasarkan kondisi dan situasinya masing-masing. Kondisi sekarang dan kondisi ideal bagi masing-masing negara berbeda secara relatif berdasarkan atas keinginan/harapan mereka masing-masing.

Dengan bobot output yang diberikan, dan dengan nilai kondisi sekarang dari instrumental input serta dengan memperhatikan sifat pengaruh instrumental input, terhadap bobot output, maka akan dapat dihitung kondisi ketahanan nasional suatu saat.

Khusus untuk Indonesia, dengan memperhatikan kondisi yang diinginkan seperti pada Bab I, maka dengan menggunakan data dari para pakar yang relevan dengan bidangnya masing-masing ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Bobot output sistem, ditetapkan oleh para pakar perencana sebagai berikut:

- (3) Bobot pengaruh instrumental input terhadap output dihitung dengan rumus:

$$B_p = S \times B_o$$

B_p = Bobot pengaruh

S = Sifat pengaruh

B_o = Bobot output

- (4) Nilai sekarang (kondisi) instrumental input ditentukan dengan cara membandingkan dengan kondisi yang diharapkan (ideal). Nilai ini berjalan dari 1 - 10 dengan pengertian nilai 10 berarti sempurna.

Gatra	Geografi	Demografi	Sumberdaya	Ideologi	Politik	Ekonomi	Sosbud	Mankam
			Alam					
Nilai	8	6	8	9	6	6	5	8

- (5) Nilai output subsistem dihitung dengan rumus:

$$N_o = \frac{\sum (B)_i (N)_i}{\sum (B_p)_i} \quad i = 1, 2, \dots$$

N_o = Nilai output subsistem (pertumbuhan, pemerataan, stabilitas)

N_i = Nilai instrumental input

B_p = Bobot pengaruh

(6) Nilai output sistem dihitung dengan rumus:

$$N_s = \frac{\sum (N_o)_j (B_o)_j}{\sum (B_o)_j} \quad j = 1, 2, \dots$$

N_s = Nilai output sistem (nilai ketahanan nasional)

N_o = Nilai output subsistem

B_o = Bobot output

Dengan menggunakan data hasil kajian penulis, maka nilai ketahanan nasional Indonesia sekarang ialah 6,6 perhitungan lengkap ada di Tabel 4 pada lampiran.

Dengan mengetahui nilai ketahanan nasional sekarang, peluang dan kendala pada lingkungan strategis, maka keinginan untuk dapat mentransformasikan struktur perekonomian ke arah pembangunan yang diinginkan seperti tercantum pada Bab I butir 2, diperlukan kebijaksanaan dan strategi seperti tercantum berikut ini.

2. Kebijakan

Berikut ini disajikan strategi yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan masalah dan menjawab tujuan tulisan ini setelah memperhatikan kondisi ketahanan nasional sekarang, serta pengaruh lingkungan strategis.

(a) Transformasi pertanian tradisional ke arah pertanian modern harus diikuti dengan perubahan-perubahan yang mempengaruhi seluruh struktur sosial, politik dan institusi masyarakat pedesaan. Tanpa adanya perubahan-perubahan seperti itu, pengembangan pertanian tidak pernah dapat dimulai. Memaksakan pengembangan pertanian tanpa perubahan struktur sosial, politik dan institusi di pedesaan hanya akan menimbulkan kesenjangan yang besar antara sekelompok pemilik tanah besar yang kaya, dengan golongan penggarap atau buruh tani miskin yang tak punya tanah samasekali. Pertanian dan pembangunan desa yang menguntungkan rakyat yang masih miskin hanya dapat dicapai melalui usaha pemerintah dan semua petani, bukan hanya petani besar saja.

Petani mempunyai hubungan yang erat dengan tanahnya. Oleh karena itu ia harus di bebaskan dari segala macam paksaan. Jika si petani kehilangan

tanahnya, ia akan jatuh miskin secara pelan-pelan. Pemerintah jangan membuat kebijaksanaan yang memisahkan petani dengan tanah.

- (b) Pemerintah harus menciptakan sistem-sistem penunjang berupa insentif yang diperlukan. Kesempatan-kesempatan berusaha dalam ekonomi dan bisnis diciptakan sehingga memungkinkan para petani kecil memperluas produksinya.
- (c) Pembangunan desa yang terpadu, sangat tergantung pada kemajuan petani-petani kecil. Bukan hanya aspek ekonomi desa yang harus dibangun tetapi juga aspek sosial seperti: pendidikan, kesehatan, makanan yang bergizi, perumahan dan sebagainya. Mengurangi kesenjangan dalam penghasilan dan berusaha dalam ekonomi dan bisnis, juga harus dilakukan.
- (d) Di bidang ideologi dan politik, penduduk pedesaan harus diberi pendidikan yang sesuai dengan tingkat pendidikan mereka, seperti kesadaran akan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Pemasyarakatan ideologi Pancasila serta demokrasi Pancasila adalah perlu.

(e) Akhirnya keamanan desa perlu dipertahankan dari segala macam gangguan agar segala macam kebijaksanaan pembangunan desa dapat terjamin.

Dari ke lima aspek tersebut di atas yakni kebijaksanaan di bidang IPOLEKSOSBUD HANKAM adalah sangat penting bagi pembangunan nasional. Hal ini bukan saja karena mayoritas penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi juga karena masalah-masalah perkotaan yakni pengangguran kota dan kongesti penduduk harus diselesaikan dalam usaha perbaikan di lingkungan pedesaan itu.

Atas dasar memperbaiki keseimbangan yang tepat antara desa dan kota dalam kesempatan berusaha, serta menciptakan kondisi sehingga rakyat dapat berpartisipasi secara luas, maka berarti telah melangkah ke arah arti yang sebenarnya dari pembangunan itu.

3. Strategi

Untuk mewujudkan kebijaksanaan yang telah dikemukakan di atas, maka berikut ini disajikan strategi, mengubah hal-hal yang harus diselesaikan, sumberdaya yang dapat digunakan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan.

(1) Aspek Geografi

Daerah perbatasan wilayah Indonesia dengan tetangga seperti perbatasan dengan Malaysia (pulau Ligitan dan Sempadan) harus sejak sekarang di tata baik, jangan sampai menimbulkan kesulitan di belakang hari. Demikian juga halnya dengan perbatasan Papua Nugini. Apabila ada kepentingan bersama di daerah perbatasan misalnya pemanfaatan sumberdaya alam, harus diatur atas dasar semangat kekeluargaan dan hubungan tetangga baik.

(2) Aspek Kependudukan

Laju pertumbuhan penduduk masih harus ditekan dengan program KB mandiri. Kualitas penduduk terus ditingkatkan dengan menyelenggarakan sistem pendidikan yang berorientasi kepada kerja. Pendidikan kejuruan yang cocok untuk teknologi tepat guna di pedesaan perlu dikembangkan sehingga mengurangi arus migrasi ke kota.

Lembaga-lembaga pedesaan yang mengendalikan produksi seperti bank-bank, distributor pupuk dan bibit perlu ditata baik. Untuk itu BRI di pedesaan dan KUD perlu diefektifkan. Pelayanan-pelayanan yang menunjang seperti pendidikan kejuruan, puskesmas, fasilitas pergudangan (lumbung desa), jalan-jalan ekonomi desa perlu diperluas.

Agar tidak terdapat kesenjangan antara desa dan kota, maka harga gabah harus dimonitor dari periode ke periode. Bagi daerah-daerah yang tidak memerlukan perubahan struktur pemilihan tanah, maka pengaturan pemerintah di bidang harga faktor produksi (upah pupuk) dan harga output produksi penting sekali, demi kemajuan pertanian. Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan gerakan nasional yang memberi kesempatan partisipasi semua pihak terutama penduduk miskin itu sendiri. Dana yang diberikan kepada kelompok swadaya masyarakat (KSM) merupakan modal kerja di daerah penduduk miskin.

Dalam hal pendidikan kita harus mengembangkan konsep pendidikan seumur hidup (pendidikan berkelanjutan), dengan memperhatikan "link and match". Ini berarti kesempatan belajar dan latihan ditiap jenjang dan profesi terus-menerus dimungkin-

BAB V

P E N U T U P

1. Perencanaan Pembangunan Yang Terpadu

Akhirnya pembangunan dengan pendekatan ketahanan nasional menuntut adanya keselarasan, bukan saja dilihat dari kehidupan ekonomi nasional, tetapi juga dari segenap aspek kehidupan. Meskipun titik berat pembangunan yang selaras itu adalah pada aspek ekonomi, namun analisis ekonomi konvensional saja kurang mampu menyelesaikan masalah-masalah pembangunan itu. Oleh karena itu peranan perencanaan dalam pembangunan dengan pendekatan ketahanan nasional itu menjadi penting. Ini berarti harus dikonstruksi suatu model perencanaan nasional yang berdasarkan UUD 1945, berwawasan nusantara serta memperhatikan kendala-kendala sistem ekonomi terbuka dan globalisasi ekonomi yang ada, serta aspek-aspek lainnya.

Ciri-ciri model perencanaan itu ialah sebagai berikut:

- (a) UUD 1945, dimana di dalamnya koperasi berperan dalam kehidupan ekonomi, disamping swasta dan BUMN.

- (b) Wawasan nusantara yakni cara pandang bangsa Indonesia dalam memanfaatkan konstelasi geografi Indonesia, sejarah dan kondisi sosial budaya untuk mewujudkan dorongan dan motivasi kearah cita-cita nasional. Oleh karena itu Indonesia harus dipandang sebagai suatu kesatuan politik, ekonomi, sosbud hankamnas.
- (c) Adanya rangsangan yang bersifat ekonomi dan moral.
- (d) Adanya kehendak sosial yang kuat ke arah pemerataan hasil-hasil pembangunan.
- (e) Adanya keinginan memprioritaskan terciptanya perekonomian nasional yang tangguh. Ekonomi Indonesia yang berdasarkan Pancasila menyadari bahwa nasionalisme ekonomi merupakan kenyataan yang hidup.
- (f) Ketahanan nasional yang menghendaki pembangunan yang seimbang, serta meningkatkan secara massal kemampuan produktif sumberdaya manusia dan sumberdaya lainnya.

- (g) Ekonomi global dimana barang, jasa, dan uang bergerak lebih leluasa ke antar negara.
- (h) Ketahanan ekonomi nasional yang sehat tidak akan melepaskan sasaran kemandirian di dalam arus globalisasi. Kemandirian itu harus ada pada: koperasi, BUMN dan swasta.

Berdasarkan atas ciri-ciri tersebut di atas, maka model pembangunan dengan pendekatan ketahanan nasional dapat dirumuskan secara matematika sebagai berikut:

Swasta : mencapai manfaat ekonomi $NB_1(X_1, X_2, \dots X_n)$

BUMN : mencapai manfaat kepentingan umum
 $NB_2(X_1, X_2, \dots X_n)$

Koperasi: mencapai manfaat sosial $NB_3(X_1, X_2, \dots X_n)$

X_1, X_2, X_3 adalah bentuk-bentuk aktivitas ekonomi swasta, BUMN dan Koperasi yang ada.

Fungsi obyektifnya ialah:

$$\begin{aligned} \text{Maksimumkan } [w_1NB_1(X_1, X_2, \dots, X_n) + w_2NB_2(X_1, X_2, \dots, X_n) \\ + w_3NB_3(X_1, X_2, \dots, X_n)] \end{aligned}$$

dengan peluang dan kendala:

- (i) Budaya bangsa (azas kekeluargaan)
- (ii) Sumberdaya alam dan lingkungan
- (iii) Sumberdaya manusia
- (iv) Struktur politik
- (v) Globalisasi
- (vi) Hankamnas
- (viii) Lain-lain yang terkait.

Model ini memungkinkan dialog antara perencanaan dengan pengambil keputusan dalam menetapkan bobot w_1 , w_2 , w_3 , serta hubungan yang jelas antara ketiga pelaku ekonomi itu. Hubungan itu harus tampak terutama pada peranan koperasi.

2. Kesimpulan

(1) Transformasi masyarakat yang masih di dominasi oleh sifat tradisional, produktivitas rendah, pendapatan per kapita rendah ke dalam masyarakat yang modern dengan produktivitas dan penghasilan per kapita tinggi haruslah:

- a. Struktur pertanian dan pola pemakaian tanah perlu disesuaikan dengan tujuan ganda, yakni meningkatkan produksi pangan, meningkatkan pemerataan keuntungan yang diperoleh di bidang pertanian secara luas.
- b. Pemerintah harus menciptakan kebijaksanaan atau aktivitas yang menunjang, yakni insentif yang diperlukan, kesempatan berusaha dalam perekonomian dan bisnis. Kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan input bagi petani-petani kecil agar dapat memperluas hasil mereka dan sekaligus meningkatkan produktivitas.
- c. Pembangunan harus dilakukan secara terpadu yakni: perbaikan taraf hidup termasuk penghasilan, pendidikan, kesehatan, perumahan.

Mengurangi ketimpangan dalam pemerataan penghasilan di desa serta antara desa dan kota.

d. Industrialisasi harus dilakukan secara efisien yang didukung oleh sektor pertanian. Pilihan teknologi harus tepat guna, sehingga industri pertanian yang tumbuh di desa tidak salah arah.

(2) Faktor-faktor yang dapat membantu negara berkembang dari perkembangan negara maju antara lain ialah: pengalihan teknologi yang sesuai, bantuan penelitian, kebijaksanaan harga komoditi internasional.

(3) Perubahan petani subsisten di pedesaan terpencil menjadi petani modern dilakukan secara bertahap. Pertama, dilakukan penganekaragaman (diversifikasi produk) pertanian atau dilakukan pertanian campuran. Kedua, pertanian spesialisasi yang harus dijalankan sesuai dengan pembangunan menyeluruh di bidang lain dalam ekonomi nasional. Konsep petani plasma sebagai bagian dari perkebunan inti rakyat misalnya merupakan salah satu cara untuk mentransformasikan petani tradisional menjadi petani komersial.

(4) Model perencanaan nasional dalam sistem keterbukaan dan ekonomi global harus memperhatikan kemandirian koperasi, BUMN dan swasta. Untuk itu dikonstruksi model pembangunan terpadu antara ketiga pelaku ekonomi tersebut sebagaimana pesan UUD 1945 dan wawasan nusantara. Kejelasan kedudukan dan fungsi koperasi di tengah-tengah swasta dan BUMN perlu ada.

3. S a r a n

Kajian terhadap kebijaksanaan pembangunan Indonesia harus terus menerus dilakukan. Salah satu sebab mengapa kebijaksanaan ekonomi melalui mekanisme pasar tidak dapat menghilangkan kemiskinan dan tidak dapat pemeratakan pendapatan, ialah terlalu banyaknya tenaga kerja (ada surplus labor). Kelebihan tenaga kerja ini jatuh ke sektor non formal dengan produktivitas rendah.

Deregulasi investasi dan pengembangan sumberdaya manusia lebih ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi dengan membesarnya penanaman modal, juga berarti peningkatan kegiatan ekonomi sehingga pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja yang dapat menyerap kelebihan tenaga tadi. Dengan adanya kesempatan untuk

bekerja dan memperoleh penghasilan, kemiskinan dapat dikurangi serta pemerataan pendapatan terjadi.

Pengembangan industri harus memilih teknologi tepat guna sehingga efisiensi terjadi. Tidak pandang apakah itu canggih atau tidak, yang penting ialah tepat dan berguna bagi penyerapan tenaga kerja yang kebetulan sekarang masih banyak di pedesaan.

Meskipun demikian, berbagai kebijaksanaan pemerintah yang berorientasi pada penciptaan tenaga kerja sering tidak menyentuh penduduk miskin. Oleh karena itu kebijaksanaan langsung perlu dilakukan seperti Inpres Desa Tertinggal dengan program yang jelas.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Boeke J.H, Economics and Economic Policy of Dual Societies.
Institute of Pacific Relations, New York, 1986.
- Goulet, D, The Cruel Choice: A New Concept in The Theory of Development Athenium, New York 1971.
- Hagen, E, The Economics of Development. Richard Irwin Inc.
London, 1980.
- Harbison, H.F, Human Resources as The Wealth of Nations,
Oxford u.p. 1973.
- Kaldor, Essays on Economic Stability and Growth, Duch Worth
& Co London, 1970.
- Kuznets. S, Modern Economic Growth, W.W. Norton, New York,
1971.
- Lewis, A, Theory of Economic Growth. Allenand Unwin, London
1963.

Max Weber, Essays in Sociology Oxford University Press
1968.

Nota Keuangan dan RAPBN 1993/1994.

Nurkse, Lectures on Economic Development, New York, 1971.

Soedjatmoko, Dimensi Manusia Dalam Pembangunan LP3S
Jakarta 1989.

Universitas Terbuka

L A M P I R A N

Universitas Terbuka

Tabel 1
Transfer Netto Modal Ke Luar
(Dalam Milyar US\$)

Tahun	Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman	Utang Baru	Transfer Netto Modal Keluar
1985	3.972	3.569	-403
1986	1.694	4.544	-449
1987	5.679	5.463	-216
1988	6.973	6.439	-526
1989	6.973	6.468	-469
1990	6.667	4.745	-1.922
1991	6.922	5.606	-1.316
1992	7.813	4.880	-2.933
1993	8.355	4.776	-3.579

Sumber: IBRD Debt Reporting System (1990) dan RAPBN (1993/1994)

Tabel 2
Defisit Neraca Barang dan Jasa
(US \$ Milyar)

Tahun	Defisit
1989	-1,3
1990	-3,2
1991	-4,3
1992	-3,7

Sumber: Nota Keuangan & RAPBN 1993/1994

Tabel 3
Lapangan Kerja dan Perkiraan Penyerapannya
Pada Akhir Repelita V

Sektor	Perkiraan	Persentase
	Penyerapan (Jutaan)	
Pertanian	39,8	49,5
Industri	9,3	11,8
Perdagangan	12,2	15,5
Jasa	14,0	17,8
Pertambangan, Listrik, Bangunan	4,3	5,5

Sumber: Sapta Karyatama Pelita VI Depnaker, 1993

TABEL: 4
 PERHITUNGAN NILAI OUTPUT SISTEM TANNAS INDONESIA
 BERDASARKAN BOBOT DAN NILAI INSTRUMENTAL INPUT SEKARANG

Output Subsystem	I N S T R U M E N T A L I N P U T										Bobot Output Subsystem TANNAS	Nilai Output Sistem TANNAS	
	Geografi	Demografi	Sumberdaya Alam	Idiologi	Politik	Ekonomi	Sossub	Hankam					
Sifat pengaruh	2	4	8	2	4	8	4	4					
Bobot pengaruh	120	240	480	120	240	480	240	240			60	6,8	
Nilai sekarang	8	6	8	9	6	6	5	8					
Sifat pengaruh	4	8	4	2	8	8	4	4					
Bobot pengaruh	100	200	100	50	200	200	100	100			25	5,8	
Nilai sekarang	6	6	7	4	6	5	5	7					
Sifat pengaruh	0	2	2	2	4	4	4	7					
Bobot pengaruh	0	30	30	30	60	60	60	105			15	7,1	
Nilai sekarang	7	6	7	8	7	8	7	8					

Nilai output subsistem untuk pertumbuhan =	$(120)(8) + (240)(6) + (480)(8) + (120)(9) + (240)(6) + (480)(6) + (240)(5) + (240)(8)$	= 6,8
	$120 + 240 + 480 + 120 + 240 + 480 + 240 + 240$	
Nilai output subsistem untuk pemerataan =	$(100)(6) + (200)(6) + (100)(7) + (50)(4) + (200)(6) + (200)(5) + (100)(5) + (100)(7)$	= 5,8
	$100 + 200 + 100 + 50 + 200 + 200 + 100 + 100$	
Nilai output subsistem untuk stabilitas =	$(0)(7) + (30)(6) + (30)(7) + (30)(8) + (60)(7) + (60)(8) + (60)(7) + (105)(8)$	= 7,1
	$0 + 30 + 30 + 30 + 60 + 60 + 60 + 120$	
Nilai output sistem Tannas Indonesia =	$(60)(6,8) + (25)(5,8) + (15)(7,1)$	= 6,6 (termasuk kategori sedang)
	100	

Tabel 5
Sumber-Sumber Pembiayaan
Pengeluaran Pembangunan, 1989/1990 - 1994/1995
(Dalam Milyar Rupiah)

T a h u n	Pengeluaran Pembangunan	Sumber Pembiayaan	
		Tabungan Pemerintah	Bantuan Luar Negeri
Repelita V			
1989/90	13.838	4.408,7	9.429,3
1990/91	19.453,3	9.548,7	9.904,6
1991/92	21.766,3	11.357,2	10.409,1
1992/93	24.137,0	13.421,3	10.715,7
1993/94 (APBN)	25.227,2	15.674,1	9.553,1
Repelita VI			
1994/95 (RAPBN)	27.398,3	17.386,3	10.012,0

Sumber: Nota Keuangan 1994/95

Tabel 6
Pengeluaran Pembangunan
APBN 1993/94 dan RAPBN 1994/95
(Dalam Milyar Rupiah)

Jenis Pengeluaran	APBN 1993/94	RAPBN 1994/95
1. Departemen/Lembaga	8.719,6	9.356,3
2. Hankam	545,7	589,3
3. Bantuan Pembangunan Daerah	4.826,6	5.340,3
- Inpres Desa Tertinggal	-	389,3
- Inpres Pembangunan Desa	390,2	423,3
- Inpres Pembangunan Dati II	1.029,6	2.417,8
- Inpres Pembangunan Dati I	783,0	1.218,7
- Inpres Sekolah Dasar	749,9	497,9
- Inpres Kesehatan	393,3	393,3
- Inpres Pasar	5,0	-
- Inpres Penunjang Jalan	1.373,3	-
- Inpres Penghijauan dan Reboisasi	104,3	-
4. Pembangunan daerah melalui penerimaan PBB	1.069,3	1.482,1
5. Subsidi Pupuk	175,0	175,0
6. Penyertaan Modal Pemerintah	125,5	50,0
7. Lain-lain Pembangunan	639,2	393,3
J u m l a h	16.100,9	17.386,3

Sumber: Nota Keuangan 1994/1995